

## LAPORAN PENELITIAN

### FENOMENA KEBAHASAAN BENTUK-BENTUK PEMENDEKAN BAHASA INDONESIA



Oleh :

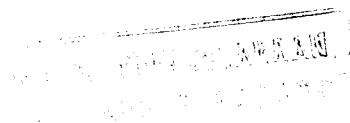
**Drs. Abdurrahman, M.Pd**  
(Ketua Peneliti)

|  |
|--|
| MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG |
| TERIMA TGL. : 08 Januari 2001          |
| SUMBER/HARGA : Hadiah                  |
| KOLEKSI : YK1                          |
| INVENTARIS : 22 JK/2001 f.2 (2)        |
| REFIKASI : 499.221 Abd - (2)           |

Penelitian ini dibiayai oleh :  
Dana Rutin Universitas Negeri Padang  
Tahun Anggaran 2000  
Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1498/K12/KU/Rutin/2000  
Tanggal 1 Mei 2000

## UNIVERSITAS NEGERI PADANG

### 2000



**FENOMENA KEBAHASAAN BENTUK-BENTUK  
PEMENDEKAN BAHASA INDONESIA**

**Oleh:**

**Drs. Abdurrahman, M.Pd. (Ketua Peneliti)  
Ermanto, S.Pd., M.Hum (Anggota)**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP)  
TAHUN 2000**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan pada tataran apa saja terdapatnya fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia; (2) menjelaskan fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan berdasarkan ilmu fonologi (bunyi bahasa) dan morfologi (bentuk kata).

Obyek penelitian ini adalah bentuk-bentuk kependekan, maka datanya adalah tuturan/ kalimat yang di dalamnya ada bentuk kependekan itu. Data bersumber dari ragam lisan dan ragam tulis. Sumber lisan diperoleh dari siaran berita televisi, radio dan pidato-pidato dari kegiatan resmi. Sumber tulis diperoleh dari surat kabar, majalah, teks-teks pidato, surat-surat resmi dan buku-buku.

Untuk menemukan fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan, peneliti harus menjelajahi data dari sumber ragam lisan dan tulis. Agar lengkap, data juga dilengkapi dengan bersumber dari bahasa Indonesia peneliti yang terlebih dahulu diujikan kepada penutur lain. Untuk menjelaskan dan mencari solusi kebahasaan tentang fenomena kebahasaan, penganalisisan digunakan metode agih beserta teknik ganti sebagai teknik lanjutan. Selain itu penganalisisan juga dilakukan dengan penginterpretasian data yang dikaitkan dengan teori-teori kebahasaan yang ada.

Fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan terdapat pada tataran fonologi. Ada bentuk kependekan yang bertolak dari ragam tulis yakni dibentuk berdasarkan grafem bukan fonem seperti *Unpad* < *Universitas Padjajaran*, *Gg* < *Gang*. Bentuk kependekan yang tidak sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia misalnya *SIUPP*, *UNAND* maka dalam pelafalan terjadi penghilangan fonem. Bentuk kependekan seperti *Mendagri*, *Depdagri* terjadi penghilangan fonem /ə/ dari bentuk asal.

Fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan terdapat pada tataran kata (morfologi). Bentuk kependekan yang seperti berasal dari kependekan padahal statusnya tetap sebagai kata seperti *AMD* < *Abri Masuk Desa*, *Pangab* < *Panglima Abri*. Bentuk kependekan yang homonim dapat diketahui maknanya berdasarkan konteks pemakaiannya. Bentuk ini misalnya *DO* < *Drop Out*, *DO* < *Delivery Order*. Bentuk kependekan yang bergeser menjadi sebuah nama sehingga penggunaannya diikuti salah satu bentuk asalnya dalam komunikasi, misalnya *PSP Padang*, *Bank BNI*. Dalam pemendekan ada yang tidak menyertakan salah satu (beberapa) kata, misalnya *Menlu* < *Menteri Luar Negeri*, *Litbang* < *Penelitian dan Pengembangan*. Bentuk kependekan *dr.* masih problematis karena tidak sesuai dengan EYD, karena itu lebih baik diganti dengan *Dtr* < *Dokter* untuk membedakannya dengan *Dr* < *Dokter*. Bentuk kependekan yang berasal dari *Profesor* ada bentuk *Prof.* sebagai gelar (singkatan) dan ada *Prof* sebagai sapaan (penggalan). Bentuk kependekan fonem/huruf-angka seperti *P4*, *BP7* mengalami dua proses yaitu proses pemendekan dan proses perubahan bentuk. Bentuk kependekan yang bisa dilafalkan dengan pengejaan fonem (huruf) atau dilafalkan seperti silabel sebaiknya digunakan tanda titik (.) untuk pengejaan. Misalnya bentuk *K.U.D.* dilafalkan [ka-u-de], jika berbentuk *KUD* dilafalkan [kud].

## PENGANTAR

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari darma perguruan tinggi, di samping pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ini harus dilaksanakan oleh Universitas Negeri Padang yang dikerjakan oleh staf akademiknya ataupun tenaga fungsional lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui peningkatan mutu staf akademik, baik sebagai dosen maupun peneliti.

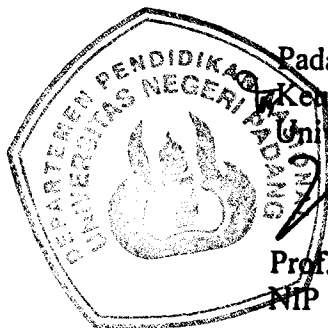
Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan mutu tenaga akademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan tingkatan serta kewenangan akademik peneliti.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan, baik yang bersifat interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi praktek kependidikan, penguasaan materi bidang studi, ataupun proses pengajaran dalam kelas yang salah satunya muncul dalam kajian ini. Hasil penelitian seperti ini jelas menambah wawasan dan pemahaman kita tentang proses pendidikan. Walaupun hasil penelitian ini mungkin masih menunjukkan beberapa kelemahan, namun kami yakin hasilnya dapat dipakai sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Kami mengharapkan di masa yang akan datang semakin banyak penelitian yang hasilnya dapat langsung diterapkan dalam peningkatan dan pengembangan teori dan praktek kependidikan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pereviu usul dan laporan penelitian Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang, yang dilakukan secara "blind reviewing". Kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosen/tenaga peneliti Universitas Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pereviu Lembaga Penelitian dan dosen senior pada setiap fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang yang menjadi pembahas utama dalam seminar penelitian. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.



Padang, Desember 2000  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Padang,

*Kumaidi*  
Prof. Drs. Kumaidi, MA., Ph.D.  
NIP 130605231

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>ABSTRAK</b> .....                            | i   |
| <b>PENGANTAR</b> .....                          | ii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                         | iii |
| <b>DAFTAR LAMBANG DAN KETERANGAN DATA</b> ..... | vi  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                 | 1   |
| 1.1 Latar Belakang dan Pentingnya Masalah.....  | 1   |
| 1.2 Perumusan Masalah.....                      | 4   |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian.....                  | 4   |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....                      | 4   |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....                     | 5   |
| <b>BAB II. KAJIAN TEORI</b> .....               | 6   |
| 2.1 Tinjauan Pustaka.....                       | 6   |
| 2.2 Landasan Teori.....                         | 8   |
| <b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....     | 14  |
| 3.1 Populasi dan Sampel.....                    | 14  |
| 3.2 Data Penelitian dan Sumber Data.....        | 15  |
| 3.3 Jalannya Penelitian.....                    | 16  |
| 3.3.1 Penyediaan Data.....                      | 16  |
| 3.3.2 Analisis Data.....                        | 16  |
| 3.3.3 Penyajian Hasil Analisis.....             | 17  |

## **BAB IV. FENOMENA KEBAHASAN DALAM BENTUK-BENTUK**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KEPENDEKAN BAHASA INDONESIA.....</b>  | <b>18</b> |
| 4.1 Fenomena-fenomena Kebahasaan dalam Pemendekan pada<br>Tataran Fonologi.....                                      | 19        |
| 4.1.1 Fenomena Pembentukan Satuan Lingual Kependekan yang<br>Berdasarkan Grafem (Huruf).....                         | 19        |
| 4.1.2 Fenomena Bentuk Satuan Lingual Kependekan yang Tidak Sesuai<br>dengan Kaidah Fonotaktik Bahasa Indonesia.....  | 21        |
| 4.1.3 Penghilangan /ə/ (pepet) dari Bentuk Asalnya.....  | 23        |
| 4.2 Fenomena-fenomena Kebahasaan dalam Pemendekan pada<br>Tataran Morfologi.....                                     | 27        |
| 4.2.1 Pemendekan atas Bentuk Satuan Lingual Kependekan.....  | 27        |
| 4.2.2 Bentuk Satuan Lingual Kependekan yang Homonim .....  | 32        |
| 4.2.3 Bentuk Satuan Lingual Kependekan sebagai Bentuk Nama Utuh....  | 41        |
| 4.2.4 Fenomena Bentuk Satuan Lingual Kependekan yang Mengabaikan<br>Salah Satu / Beberapa Kata dalam Pemendekan..... | 45        |
| 4.2.5 Bentuk Satuan Lingual Kependekan dr. (Dokter) yang Tidak Sesuai<br>dengan EYD.....                             | 47        |
| 4.2.6 Bentuk Satuan Lingual Kependekan <i>Prof.</i> sebagai Singkatan dan<br><i>Prof</i> sebagai Penggalan.....      | 51        |
| 4.2.7 Bentuk Satuan Lingual Kependekan Gabungan Fonem/Huruf-<br>Angka.....   | 56        |

|   |    |
|---|----|
| 4.2.8 Pelafalan Bentuk Satuan Lingual Kependekan yang Meragukan<br>Berdasarkan Bentuk Ortografisnya ..... | 61 |
| <b>BAB V. PENUTUP</b> .....   | 66 |
| 5.1 Kesimpulan.....   | 66 |
| 5.2 Saran.....  | 67 |
| <b>KEPUSTAKAAN</b> .....  | 69 |

## DAFTAR LAMBANG DAN KETERANGAN DATA

### 1. Daftar Lambang

- \*..... = menyatakan ketidakgramatikan
- .....<..... = berasal dari
- .....>..... = menjadi
- {.....} = salah satu unsur di dalamnya harus dipilih
- ( ) = konstituen yang ada di dalamnya bersifat opsional yang boleh hadir dan boleh juga tidak hadir
- / / = menyatakan bunyi fonemis
- [ ] = menyatakan bunyi fonetis
- < > = menyatakan grafem
- / = menyatakan *atau*

### 2. Keterangan Data

Untuk semua data (tuturan/kalimat) yang terdapat dalam penelitian ini dapat diterangkan dengan contoh data berikut ini.

- (1) {Sekretaris Jenderal }  
{*Sekjen* } Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, H. MS.  
Ka'ban, M.Si membantah bila Prof. Yusril Ihza Mahendra terlibat dalam skandal bank Bali.

(Singgalang, 8 November 1999, hal. 2)

Pada contoh data (1) di atas berarti data (tuturan/kalimat) aslinya adalah kependekan yang sejajar dengan tuturan/kalimat itu yakni *Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, H. MS. Ka'ban, M.Si membantah bila Prof. Yusril Ihza Mahendra terlibat dalam skandal bank Bali.*

Data yang tidak dituliskan sumbernya berarti data tersebut adalah data yang dimunculkan oleh peneliti sebagai penutur asli yang sebelumnya diujikan kepada penutur lain.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang dan Pentingnya Masalah

Perkembangan bahasa Indonesia akhir-akhir ini salah satunya ditandai oleh pesatnya perkembangan jumlah kosa kata baru bahasa Indonesia. Soedjito (1992:3) menegaskan bahwa kosa kata bahasa Indonesia semakin bertambah sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pengembangan kosa kata itu dilakukan dengan beberapa cara: (1) penyerapan dari kosa kata bahasa asing, (2) pemungutan kosa kata dari bahasa daerah dan (3) pemendekan kosa kata-kosa kata bahasa Indonesia sendiri. Fenomena pemendekan ini memperlihatkan perkembangan yang luar biasa dalam bahasa Indonesia.

Bentuk-bentuk kependekan banyak digunakan para penutur bahasa Indonesia. Bentuk kependekan itu telah berkembang dan digunakan dalam komunikasi di lembaga-lembaga resmi baik pemerintahan maupun swasta di Indonesia. Bentuk kependekan ini pun banyak ditemukan dalam media massa di Indonesia sebagai media pengkomunikasian informasi kepada masyarakat.

Proses pemendekan telah merupakan gejala yang umum terjadi dalam banyak bahasa. Pemendekan merupakan proses yang cukup produktif dan terdapat hampir pada semua bahasa (Chaer, 1994a:192). Keproduktifan proses pemendekan ini pada dasarnya disebabkan untuk tujuan menghemat tempat (dalam ragam tulis) dan tentu juga untuk menghemat ucapan dan waktu (dalam ragam lisan). Antila (1989:41) mengemukakan bahwa syarat kecepatan dan ruang telah menuntut tidak

hanya sistem tulisan cepat tapi juga menuntut diperlukannya penerapan abreviasi dan akronim yang dikembangkan sebagai suatu bagian yang berdiri sendiri untuk keseluruhan. Menurut Rahmawati (1988:12) pemendekan merupakan cara yang cukup tepat dalam pengembangan istilah untuk memungkinkan pelambangan konsep dan gagasan kehidupan modern.

Bentuk-bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak masa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan yang akhirnya ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Soedjito (1992:10) menegaskan bahwa pemendekan telah menjadi salah satu ciri yang paling menonjol dari perkembangan bahasa Indonesia sejak Indonesia merdeka. Winarno (1991:5) mengungkapkan pula bahwa pembentukan dan pemakaian singkatan dan akronim dalam bahasa Indonesia, agaknya tidak dapat dicegah karena kedua bentuk itu terjadi tidak hanya dalam bahasa Indonesia tetapi juga terjadi dalam bahasa internasional seperti bahasa Inggris.

Pesatnya perkembangan proses pemendekan telah menghasilkan berbagai bentuk kependekan. Perkembangan bentuk-bentuk kependekan yang pesat dalam bahasa Indonesia telah memunculkan fenomena kebahasaan pada proses dan bentuk kependekan itu. Fenomena kebahasaan tersebut misalnya adanya proses pemendekan dari bentuk kependekan, adanya bentuk satuan lingual kependekan yang homonim, adanya bentuk kependekan yang berbentuk fonem-angka, dan tentu masih ada fenomena kebahasaan lain yang memerlukan penjelasan secara kebahasaan. Fenomena kebahasaan yang muncul itu perlu diinventarisasi dan

dikaji beriringan dengan pesatnya perkembangan bentuk kependekan tersebut dalam bahasa Indonesia.

Jadi, pada dasarnya banyak ditemukan bentuk-bentuk kependekan yang kelihatan bermasalah tetapi pada hakekatnya mungkin tidak bermasalah secara ilmu kebahasaan. Sebaliknya, banyak pula ditemukan bentuk-bentuk kependekan yang kelihatan tidak bermasalah tetapi pada hakekatnya mungkin bermasalah secara ilmu kebahasaan. Bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia yang terlihat samar-samar atau diragukan secara ilmu kebahasaan merupakan suatu masalah yang pantas untuk diteliti.

Permasalahan bentuk-bentuk kependekan yang dilihat secara ilmu kebahasaan tersebut banyak diungkapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Misalnya, ketika adanya bentuk kependekan *AMD* yang berasal *Abri Masuk Desa*. Penutur bahasa Indonesia menyangsikan keberadaannya sebab huruf *A* dalam bentuk kependekan *AMD* merupakan bersal dari bentuk kependekan pula yakni *ABRI*. Bentuk kependekan *ABRI* berasal dari *Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*. Jadi fenomena kebahasaan pada bentuk-bentuk kependekan itu merupakan akibat pesatnya pembentukan kependekan dengan proses memendekkan beberapa kata bahasa Indonesia atau dari kata-kata bahasa asing. Pemendekan itu dilakukan pula dengan bermacam cara oleh para penutur bahasa Indonesia, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Hal itu tentulah tidak selalu menghasilkan bentuk kependekan yang tepat tetapi juga akan melahirkan bentuk kependekan yang tidak tepat. Karena itulah fenomena itu muncul. Bertolak

dari uraian itu, penelitian tentang fenomena kebahasaan dalam bentuk-bentuk kependekan bahasa Indonesia menjadi penting untuk diteliti.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disajikan di atas, berikut ini dikemukakan rumusan masalah penelitian yaitu: bagaimana fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia ditinjau dari ilmu fonologi (bunyi bahasa) dan morfologi (bentuk kata)?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah di atas, berikut ini dikemukakan pertanyaan penelitian yakni:

- (1) pada tataran apa saja terdapatnya fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia;
- (2) bagaimana fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan berdasarkan ilmu fonologi (bunyi bahasa) dan morfologi (bentuk kata).

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk:

- (1) menjelaskan pada tataran apa saja terdapatnya fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia;
- (2) menjelaskan fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan berdasarkan ilmu fonologi (bunyi bahasa) dan morfologi (bentuk kata).

### **1.5 Manfaat Penelitian.**

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

- (1) dapat dijadikan pedoman bagi penutur bahasa Indonesia jika membuat kependekan untuk masa datang;
- (2) dapat dijadikan pedoman untuk memahami fenomena kebahasaan dalam bentuk-bentuk kependekan bahasa Indonesia
- (3) dapat dijadikan bahan masukan bagi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk menata atau bentuk-bentuk kependekan bahasa Indonesia.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Ahli bahasa yang membicarakan masalah pemendekan dalam bahasa Indonesia di antaranya Dardjowidjojo (1979) dalam artikelnya yang berjudul *Acronymic Patterns in Indonesia* yang dimuat dalam *Pacific Linguistic Series C, No 45* yang diterbitkan *The Australian National University*. Dardjowidjojo tidak membuat perbedaan antara abreviasi dengan akronim. Bentuk kependekan dibedakannya atas dua golongan besar yakni abreviasi yang telah digunakan dalam waktu yang cukup lama dan bentuk kependekan yang digunakan dalam waktu yang belum begitu lama. Dardjowidjojo dalam artikel tersebut membicarakan pola-pola pembentukan kependekan (akronim), namun tidak memilah kekhasan bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia ragam lisan dan ragam tulisan.

Notosusanto (1979) membicarakan pemendekan dalam makalahnya yang berjudul *Masalah Akronim dan singkatan dalam Bahasa Indonesia* ditampilkan dalam Kongres Bahasa Indonesia III dan dimuat dalam majalah *Bahasa dan Sastra* Nomor 2 tahun 1979. Notosusanto membicarakan pembagian singkatan dan akronim dalam beberapa jenis berdasarkan aspek substansi bukan aspek kebahasaan. Notosusanto menyimpulkan jika diakui bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi antarmanusia, maka selama fungsi itu dapat terlaksana, penggunaan akronim dan singkatan dapat dipertanggungjawabkan. Notosusanto

menegaskan akronim dan singkatan itu memenuhi suatu kebutuhan nyata dalam berbahasa dan tidaklah produk dari sikap yang mengada-ada.

Widodo (1984) membicarakan kependekan dengan skripsinya berjudul *Singkatan dan Akronim dalam Bahasa Indonesia*. Dalam penelitian tersebut, hal yang dibicarakan adalah pola-pola akronim dan singkatan yang terdapat dalam bahasa Indonesia ragam lisan/tulisan. Selain itu, juga disajikan latar belakang produktifitas akronim dan singkatan dalam bahasa Indonesia serta akibatnya. Selain itu kependekan dibicarakan Kurniawati (1993) berjudul *Akronim dan Singkatan dalam Surat Kabar Harian*. Penelitian ini lebih melihat peranan dan penulisan akronim dan singkatan yang terdapat dalam surat kabar harian Bernas Yogyakarta. Penelitiannya lebih bersifat terapan dengan mengkaji penulisan akronim dan singkatan, keistimewaannya, faktor penyebab produktifitasannya, bentuknya serta dampak penulisan akronim dan singkatan itu dalam media massa cetak khususnya surat kabar harian Bernas.

Pengertian dan jenis kependekan secara sepintas dibicarakan oleh Keraf (1987) dalam bukunya *Diksi dan Gaya Bahasa*, Cahyono (1995) dalam bukunya *Kristal-kristal Ilmu Bahasa*, Kridalaksana (1996) dalam bukunya berjudul *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*, Chaer dalam bukunya *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia* (1994a), *Linguistik Umum* (1994b), *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia* (1995). Sarjana bahasa lain yang juga pernah membicarakan pemendekan dalam bahasa Indonesia adalah Parera (1994) dalam bukunya berjudul *Morfologi Bahasa*, Pateda (1995) dalam bukunya berjudul *Kosakata dan Pengajarannya*, Soedjito (1992) bukunya berjudul *Kosakata Bahasa Indonesia*,

Sudaryanto (1985) dalam bukunya berjudul *Linguistik: Esai tentang Bahasa dan Pengantar ke dalam Ilmu Bahasa*, dan Tarigan dalam bukunya *Pengajaran Kosakata* (1986a) dan *Pengajaran Semantik* (1986b). Dalam buku tersebut pada umumnya hanya membicarakan tentang jenis-jenis bentuk kependekan.

Dengan demikian, pembicaraan pemendekan dalam bahasa Indonesia belum terkaji secara mendalam serta belum memuaskan. Pembicaraan fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan belum pernah dibicarakan, padahal fenomena ini berkembang sesuai dengan perkembangan bentuk-bentuk kependekan itu. Karena itu fenomena tersebut perlu diteliti untuk menjelaskannya kepada masyarakat penutur bahasa Indonesia.

## **2.2 Landasan Teori**

Pemendekan (abreviasi) adalah suatu proses kebahasaan yang memerlukan masukan dan menghasilkan keluaran. Masukan dan keluaran proses pemendekan adalah satuan lingual (satuan kebahasaan). Bentuk satuan lingual yang dipendekkan adalah kata (kelompok kata) dan hasilnya adalah bentuk kependekan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:3) abreviasi diartikan pemendekan bentuk sebagai pengganti yang lengkap, bentuk singkatan tertulis sebagai pengganti kata atau frase. Kridalaksana (1993:1) pemendekan sebagai proses morfologis berupa penanggalan satu atau beberapa bagian dari kombinasi



leksem sehingga terjadi bentuk baru yang berstatus kata. Chaer (1994a:191) menjelaskan pemendekan sebagai proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya dan hasil proses pemendekan disebut kependekan. Jadi, pemendekan adalah proses memendekkan kata (kelompok kata) yang menghasilkan bentuk kependekan.

Bentuk kependekan dibedakan atas beberapa jenis dalam bahasa Indonesia. Menurut Chaer (1994a:191), pemendekan dibedakan atas (1) penggalan yaitu kependekan berupa pengekaln satu atau dua suku pertama dari bentuk yang dipendekkan; (2) singkatan yaitu hasil proses pemendekan yang berupa pengekaln huruf awal sebuah leksem, huruf-huruf awal gabungan leksem, beberapa huruf dari sebuah leksem, huruf pertama dikombinasi dengan angka untuk pengganti huruf yang sama, pengekaln dua, tiga, atau empat huruf pertama leksem, pengekaln huruf pertama dan huruf terakhir sebuah leksem; (3) akronim adalah hasil pemendekan yang berupa kata atau dapat dilafalkan sebagai kata. Kridalaksana (1993:1) mengemukakan abreviasi ini menyangkut penyingkatan, pemenggalan, akronimi, kontraksi, lambang huruf. Pateda (1995:168) mengemukakan bahwa selain akronim dan singkatan terdapat pula penggalan, kontraksi dan lambang huruf. Berkaitan dengan jenis bentuk kependekan ini, Crowley (1987:31) menyebut pula adanya *compression* (kompresi yang berarti pemampatan) yaitu proses menghilangkan satu atau lebih silabel dari akhir atau tengah suku seperti *uni* dari *university*, *admin* dari *administration*. Selain itu ada pula jenis pemendekan yang disebut dengan *blends* seperti *smog* dari *smoke fog*

dan *motel* dari motor hotel (Fromkin, 1988:135, Bauer, 1983:234, Bauer 1988:39, Cahyono, 1995:110).

Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya dan secara khusus dilihat berdasarkan sarananya, dapat dibagi atas ragam lisan dan ragam tulis (Moeliono, 1993:5-6). Pernyataan atas pengakuan bahasa Indonesia ragam lisan dan bahasa Indonesia ragam tulis pada dasarnya menunjukkan adanya perbedaan sistem antara kedua ragam itu dan keduanya memiliki sistem yang harus diakui kemandiriannya. Sehubungan dengan itu, Lyons (1977:69) mengemukakan secara mendasar, perbedaan bahasa ragam lisan dan bahasa ragam tulis terlihat pada ciri (1) perbedaan tingkat pementingan unsur gramatika, leksikal, prosodi dan paralingual; (2) perbedaan kelengkapan unsur; dan (3) ada tidaknya sifat kespontanan. Untuk itu, Lyons (1977:69) menyatakan karena semakin mencoloknya sifat perbedaan-perbedaan tersebut —di dalam perkembangannya— bahasa tulis semakin memperlihatkan sifat kemandiriannya walaupun secara prinsip tetap merupakan derivasi dari bahasa lisan.

Bentuk-bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia ragam lisan dan ragam tulis memperlihatkan perilaku kebahasaan yang berbeda. Banyak bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia ragam tulis tidak terdapat dalam ragam lisan. Perbedaan itu menimbulkan fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan di antara kedua ragam ini disebabkan oleh adanya kemandirian sistem pada masing-masing ragam tersebut. Hal itu ditopang oleh penjelasan Antila (1989:41) yakni secara aslinya atau pada mulanya pemendekan hanya terjadi dalam bahasa tulis, kemudian pemendekan tersebut diikuti pula dalam bentuk ujaran (bahasa lisan),

sekarang praktisnya cukup populer pemendekan dapat digunakan secara langsung dalam bentuk ujaran.

Pemendekan sebagai suatu proses kebahasaan merupakan proses yang membentuk satuan lingual baru yang berstatus sebagai kata. Bentuk satuan lingual baru yang dihasilkan itu mengungkapkan konsep yang sama dengan satuan lingual (kata atau kelompok kata) yang dipendekkan. Pemendekan sebagai suatu proses pembentuk kosa kata bahasa Indonesia pada dasarnya sejajar dengan proses kebahasaan lainnya seperti proses morfologis, proses penyerapan kata bahasa asing, proses pemungutan kata dari bahasa daerah atau proses penciptaan kata baru untuk memperkaya khasanah kosa kata bahasa Indonesia. Kridalaksana (1993:180) bahkan memasukkan pemendekan sebagai bagian dari proses morfologis disamping derivasi zero, afiksasi, reduplikasi, komposisi (pemajemukan) dan derivasi balik. Namun, Samsuri (1994:190, Ramlan 1987:52 dan Matthews 1974:116) dengan tegas menyatakan bahwa pemendekan tidak disebutkan sebagai proses morfologis.

Pemendekan sebagai proses pembentukan kata, hal ini dikemukakan oleh banyak pakar bahasa. Parera (1994:123) mengemukakan beberapa cara pembentukan kata tersebut yakni (1) pembentukan kata dengan unsur bahasa yang telah ada; (2) pembentukan kata dengan meniru bunyi/anomatopoetika; (3) pembentukan kata dengan derivasi; (4) pembentukan kata dengan singkatan dan akronim; (5) pembentukan kata dengan penerjemahan; (6) pembentukan kata dengan penggabungan asing dan bentuk asli; (7) pembentukan kata dengan pinjaman. Cahyono (1995:106) mengemukakan proses pembentukan

kata itu adalah: (1) penciptaan baru; (2) pungutan; (3) penggabungan; (4) pengakroniman; (5) derivasi, infleksi dan proses lain yakni peleburan (*blending*) dan pemangkasan (*clipping*). Soedjito (1992:3) mengemukakan sumber perluasan kosa kata dibaginya atas sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalam sebagai swadaya bahasa sendiri adalah (1) pengaktifan kata-kata lama; (2) pembentukan baru dengan pengimbuhan dan pemajemukan; (3) penciptaan baru; (4) pengakroniman. Sumber luar adalah (1) peminjaman kata-kata dari bahasa serumpun; (2) peminjaman kata-kata dari bahasa asing. Selain itu Fromkin, dkk (1988:127-138) mengemukakan kaidah pembentukan kata adalah (1) derivasional morfologi; (2) penciptaan kata dengan pemajemukan, akronim, *blends*, *back formation*, abreviasi, kata dari nama; (3) morfologi infleksi. Demikian pula Bauer (1988:19-41) mengemukakan secara morfologi struktur kata adalah (1) *word building processes using affixes*; (2) *reduplication*; (3) *word building by modification of the base*; (4) *relationships with no change of form*; (5) *cases involving shortening bases*; (6) *processes involving several lexemes*; (7) *alphabet based formations*; (8) *unique morphs*; (9) *suppletion*. (bandingkan dengan Bauer, 1983: 201-240). Jadi, singkatnya dapat ditegaskan bahwa pemendekan dengan berbagai jenisnya menurut para pakar adalah proses kebahasaan untuk membentuk kata. Pemendekan sebagai proses pembentukan kata secara morfologi diakui Bauer (1988:39) yang disebutnya dengan *alphabet-based formations*. Demikian juga Bauer (1983:232) mengemukakan pemendekan sebagai proses pembentukan kata dalam bahasa Inggris yang disebutnya sebagai proses pembentukan kata yang tidak teramalkan (*unpredictable formations*).

Sebagai kata, bentuk kependekan telah memperkaya khasanah kosa kata bahasa Indonesia. Bentuk-bentuk satuan lingual itu adalah bentuk satuan lingual baru yang dilahirkan melalui proses pemendekan dengan berbagai pola pembentukannya secara kreatif yang dilakukan oleh para penuturnya. Bentuk-bentuk kependekan muncul dengan perkembangan yang terus-menerus sampai sekarang bahkan sampai masa yang akan datang dalam bahasa Indonesia. Karena itu, fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan akan muncul pula beriringan dengan perkembangannya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam pembahasan metode penelitian akan dibicarakan: (1) populasi dan sampel penelitian; (2) data penelitian dan sumber data; (3) jalannya penelitian.

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian kebahasaan adalah keseluruhan tuturan bahasa Indonesia yang dihasilkan atau dipakai oleh penutur bahasa Indonesia yang luas adanya atau tuturan yang sudah diadakan, baik yang kemudian tuturan itu dipilih sebagai sampel penelitian maupun tuturan itu tidak dipilih sebagai sampel penelitian sebagai kesatuan (Sudaryanto, 1990:33-37, Subroto, 1992:32). Jadi populasi itu adalah jumlah keseluruhan pemakaian bahasa yang tidak terlihat batas-batasnya sebagai akibat banyaknya pemakai bahasa itu, lamanya waktu pemakaian, dan luasnya daerah serta lingkungan penuturnya. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan tuturan yang memiliki bentuk-bentuk kependekan yang digunakan oleh penutur dalam bahasa Indonesia.

Sampel penelitian ini adalah tuturan hasil pemakaian bahasa yang memiliki bentuk-bentuk kependekan dipilih yang representatif dan cukup mewakili keseluruhan populasi (Sudaryanto, 1990:33, Subroto, 1992:32).

### **3.2 Data Penelitian dan Sumber Data**

Obyek penelitian ini adalah bentuk-bentuk kependekan, maka data penelitian ini adalah tuturan/ kalimat yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk kependekan itu. Data ini merupakan bahan penelitian yang merupakan bahan jadi karena adanya pemilihan dan pemilahan aneka macam tuturan (Sudaryanto, 1990:3).

Sumber data penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber yakni bahasa Indonesia ragam lisan dan ragam tulis. Sumber lisan diperoleh dari siaran berita televisi, radio dan pidato-pidato dari kegiatan resmi. Sumber tulis diperoleh dari surat kabar, majalah, teks-teks pidato, surat-surat resmi dan buku-buku.

Oleh karena yang akan ditemukan adalah fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan, maka peneliti harus menjelajahi data dari berbagai sumber kedua ragam tersebut (lisan dan tulis). Data untuk penelitian ini digunakan data-data yang pernah peneliti kumpulkan untuk penelitian lain yang dikumpulkan pada tahun 1998 yang lalu. Sumber data itu adalah: SKH. Bernas, SKH. Kedaulatan Rakyat, SKH. Kompas, SKH. Jawa Pos, SKH. Republika, Lembar bilyet Deposito BNI, Tabloid Mingguan Adil, Berita Pagi RCTI, Liputan 6 petang SCTV, Berita Nusantara II RRI Yogyakarta. Data tersebut dikumpulkan dalam rentangan waktu bulan September s.d. Oktober 1998.

Supaya data benar-benar diperoleh lengkap sesuai dengan gejala yang muncul, data juga dilengkapi dengan bersumber dari bahasa Indonesia peneliti sendiri yang dibangkitkan secara intuitif sebagai penutur asli yang menghayati bahasa Indonesia dengan baik. Bahan itu pun tentu telah dipilih dengan diujikan

pula lebih dahulu kepada penutur (asli) bahasa Indonesia lainnya. Data-data yang bersumber dari peneliti dalam penelitian ini tidak dituliskan sumbernya.

### **3.3 Jalannya Penelitian**

Dalam penelitian bahasa terdapat tiga tahapan kerja penelitian yang harus dilakukan secara hirarkis. Tiga tahapan penelitian itu adalah penyediaan data, analisis data dan tahap penyajian atau pemaparan hasil analisis (Sudaryanto, 1993:4-9, 1992:57-59). Ketiga tahapan kerja penelitian itu diuraikan berikut ini.

#### **3.3.1 Penyediaan Data**

Pada tahap penyediaan data dilakukan kegiatan pencarian data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan metode simak dan teknik rekam serta teknik catat sebagai teknik lanjutan. Penyimakan dilakukan dengan menyadap data kebahasaan, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Data dicatat dalam kartu data. Pencatatan dilakukan dengan transkripsi ortografis dan juga transkripsi fonemis sesuai dengan sumber data itu (Sudaryanto, 1993:133-136).

#### **3.3.2 Analisis Data**

Setelah data dianggap mewakili semua gejala permasalahan pemendekan yang dimungkinkan ada, data diklasifikasikan berdasarkan jenis gejalanya. Tahap analisis data dilakukan untuk menemukan fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan. Identifikasi dan klasifikasi data dilakukan untuk menemukan pada



tataran kebahasaan apa saja wujud fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan. Untuk menjelaskan dan mencari solusi kebahasaan tentang fenomena-fenomena kebahasaan, penganalisisan digunakan metode agih beserta teknik ganti, sebagai teknik lanjutan. Selain itu penganalisisan juga dilakukan dengan penginterpretasian data yang dikaitkan dengan teori-teori kebahasaan yang ada.

### 3.3.3 Penyajian Hasil Analisis

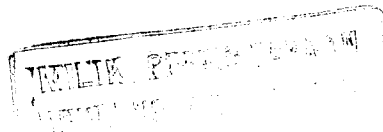
Penyajian hasil analisis dalam penelitian ini akan menggunakan metode penyajian informal dan juga dengan metode penyajian formal. Metode penyajian informal adalah pelaporan hasil analisis secara lisan atau penyajian dengan kata-kata biasa. Metode penyajian formal adalah pelaporan hasil analisis yang disajikan dengan tanda dan lambang-lambang (Sudaryanto, 1993:145). Kedua metode ini dimanfaatkan agar pelaporan hasil analisis diwujudkan secara baik dan komunikatif.

## BAB IV

### FENOMENA KEBAHASAN DALAM BENTUK-BENTUK

#### KEPENDEKAN BAHASA INDONESIA

Berdasarkan analisis terhadap data-data bentuk satuan lingual kependekan yang terdapat dalam bahasa Indonesia, ditemukan beberapa fenomena kebahasaan yang perlu dikaji, dijelaskan atau dicarikan alternatif penyelesaiannya secara kebahasaan. Fenomena-fenomena tersebut ditemukan pada tataran fonologi (bunyi) dan tataran morfologi (kata). Fenomena kebahasaan yang ditemukan pada tataran fonologi adalah: (1) fenomena pembentukan satuan lingual kependekan yang berdasarkan grafem (huruf), (2) fenomena bentuk satuan lingual kependekan yang tak sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia, dan (3) fenomena penghilangan /ə/ (pepet) dari bentuk asalnya. Fenomena kebahasaan yang ditemukan pada tataran morfologi adalah: (1) fenomena pemendekan atas bentuk satuan lingual kependekan; (2) fenomena bentuk satuan lingual kependekan yang homonim; (3) fenomena bentuk satuan lingual kependekan sebagai bentuk nama utuh; (4) fenomena bentuk satuan lingual kependekan yang mengabaikan salah satu/ beberapa kata dalam pembentukannya (5) fenomena bentuk satuan lingual kependekan *dr.* (Dokter) yang tidak sesuai dengan ejaan; (6) fenomena bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* sebagai singkatan dan *Prof* sebagai penggalan; (7) fenomena bentuk satuan lingual kependekan gabungan fonem/huruf-angka, (8) fenomena pelafalan bentuk satuan lingual kependekan jenis yang meragukan



berdasarkan bentuk ortografisnya. Fenomena-fenomena kebahasaan dalam pemendekan tersebut akan dikaji satu per satu berikut ini.

#### 4.1 Fenomena-fenomena Kebahasaan dalam Pemendekan pada Tataran Fonologi

##### 4.1.1 Fenomena Pembentukan Satuan Lingual Kependekan yang Berdasarkan Grafem (huruf)

Dari beberapa bentuk satuan lingual kependekan ditemukan adanya pembentukan satuan lingual kependekan dengan pengambilan grafem (huruf) dari kata yang dipendekkan. Fenomena pembentukan satuan lingual kependekan dengan pengambilan grafem atau huruf satuan lingual kata yang dipendekkan, dijelaskan berdasarkan contoh data nomor (1) dan (2) di bawah ini.

- (1) Pemimpin Umum LKBN Antara Parni Hadi menolak anggapan bahwa pekerjaan seorang  $\left. \begin{array}{l} \text{humas} \\ \text{hubungan masyarakat} \end{array} \right\}$  adalah menutupi kejelekan, menolak kekurangan, mengeksploitasi keberhasilan bahkan lebih buruk lagi membohongi masyarakat untuk sebuah citra.  
(SKH. Bernas, 13 Oktober 1998 hal. 2)

- (2) Beberapa perguruan tinggi yang aktif menyuarakan reformasi selama ini di Bandung adalah  $\left. \begin{array}{l} \text{Unpad,} \\ \text{Universitas Padjajaran} \end{array} \right\}$  ITB, IKIP Bandung, dan sebagainya.

Pada contoh nomor (1) dan (2) di atas terdapat bentuk satuan lingual kependekan *Humas* dan *Unpad*. Dilihat dari segi pembentukannya, bentuk satuan lingual kependekan *Humas* < *Hubungan masyarakat*, *Unpad* < *Universitas Padjajaran*. Secara fonemis, bentuk satuan lingual kependekan tersebut adalah */humas/* < */hubungan masarakat/*, */unpad/* < */universitas pajajaran/*.

Berdasarkan analisis bentuk satuan lingual kependekan dengan bentuk satuan lingual kata yang dipendekkan, secara fonemis bentuk satuan lingual kependekan itu seharusnya /humas̃/ < /hubungan maśarakat/, /unpaj/ < /universitas pajajaran/. Jika ditulis secara ortografis bentuk satuan lingual kependekan tersebut adalah <Humasy> dan <Unpadj>. Kenyataannya bentuk satuan lingual kependekan tersebut dalam bahasa Indonesia adalah <Humas> atau /humas/ dan <Unpad> atau /unpad/. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukannya bukanlah dilakukan dengan pengambilan fonem atau silabel dari satuan lingual kata yang dipendekkan.

Bentuk-bentuk satuan lingual kependekan lain yang pembentukannya dilakukan dengan pengambilan grafem atau huruf satuan lingual kata yang dipendekkan itu adalah *Muspida* < *Musyawah Pimpinan Daerah*, *Bimas* < *Bimbingan Masyarakat*, *Gg* < *Gang*. Secara fonemis bentuk satuan lingual kependekan tersebut adalah /muspida/ < /muśawah pimpinan daerah/, /bimas/ < /bimbiġan maśarakat/. Bentuk satuan lingual kependekan *Gg* tidak dimiliki dalam ragam lisan karena itu tidak dapat dituliskan secara fonemis. Jika pembentukan satuan lingual kependekan di atas dilakukan berdasarkan pengambilan fonem atau kelompok fonem satuan lingual kata yang dipendekkan maka bentuknya adalah /mušpida/ < /muśawah pimpinan daerah/, /bimaš/ < /bimbiġan maśarakat/ dan /Gġ/ < /Gaġ/. Secara ortografis bentuk satuan lingual kependekan itu adalah <Musypida>, <Bimasy> dan /Gng/.

Fenomena pembentukan satuan lingual kependekan yang dilakukan berdasarkan pengambilan grafem atau huruf tersebut menunjukkan bahwa

pembentukannya dilakukan dalam bahasa Indonesia ragam tulis. Hal tersebut mendukung pernyataan Antila yang dijelaskan terdahulu bahwa pembentukan satuan lingual kependekan pada awalnya hanya terjadi dalam bahasa ragam tulis yang kemudian berkembang atau digunakan pula dalam bahasa ragam lisan.

#### 4.1.2 Fenomena Bentuk Satuan Lingual Kependekan yang Tidak Sesuai dengan Kaidah Fonotaktik Bahasa Indonesia

Dalam bahasa Indonesia terdapat kaidah fonotaktik. Kaidah fonotaktik itu merupakan kaidah yang mengatur penjejeran fonem dalam suatu bahasa. Oleh karena itu, singkatan dan akronim hendaknya serasi dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia (Moeliono dan Dardjowidjojo, 1993:23-24). Berdasarkan bentuk-bentuk satuan lingual kependekan yang terdapat dalam bahasa Indonesia ditemukan fenomena kebahasaan mengenai bentuk satuan lingual kependekan yang tidak sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia.

Pembicaraan fenomena tersebut dapat dijelaskan berdasarkan contoh data nomor (3) – (4) di bawah ini.

- (3) Sejak dibukanya kebebasan pers, sudah 200  
    { *SIUPP*  
    { Surat Izin Usaha Penerbitan Pers } baru yang dikeluarkan  
    Departemen Penerangan.

(Kedaulatan Rakyat, 29 Oktober 1998 hal.2)

- (4) Menurut dia, tujuan awal privitasi { Badan Usaha Milik Negara }  
    { *BUMN* } adalah untuk  
    menutup kekurangan dalam APBN.

(Kompas, 7 Oktober 1998 hal. 2)

Pada data nomor (3) dan (4) di atas terdapat bentuk satuan lingual kependekan *SIUPP* dan *BUMN*. Ditilik dari proses pembentukannya, bentuk



satuan lingual kependekan tersebut adalah *SIUPP* < surat izin usaha penerbitan pers, *BUMN* < badan usaha milik negara. Pola pemendekan yang digunakan dalam pembentukan satuan lingual kependekan *SIUPP* dan *BUMN* dengan pola pengambilan fonem-fonem awal satuan lingual kata yang dipendekkan. Jika bentuk satuan lingual kependekan itu digunakan dalam bahasa Indonesia ragam lisan maka bentuknya adalah seperti contoh nomor (3a) dan (4a) di bawah ini.

(3a) Sejak dibukanya kebebasan pers, sudah 200  
 $\left\{ \begin{array}{l} \textit{SIUPP} \\ \textit{[siup]} \end{array} \right\}$  baru yang dikeluarkan Departemen Penerangan.

(4a) Menurut dia, tujuan awal privitasi  
 menutup kekurangan dalam APBN.  $\left. \begin{array}{l} \textit{[BUMN (be-u-em-en)]} \\ \textit{[bumn]} \\ \textit{BUMN} \end{array} \right\}$  adalah untuk

Berdasarkan contoh nomor (3a) dan (4a) di atas, pelafalan satuan lingual kependekan *SIUP* adalah *[siup]* dan *BUMN* adalah *[bum]*. Bentuk satuan lingual kependekan /*siup*/ terdiri dari dua suku kata yakni /*si-up*/ dan /*bum*/ hanya terdiri dari satu suku kata. Bentuk satuan lingual kependekan <*SIUPP*> dan <*BUMN*> dalam ragam tulis ternyata dilafalkan dengan menghilangkan fonem akhir menjadi /*siup*/ dan /*bum*/ dalam ragam lisan. Perbedaan itu disebabkan penjejan fonem-fonem yang membentuk satuan lingual kependekan tersebut tidak sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia. Penjejan dua fonem yang sama seperti /-pp/ atau dua konsonan /-mn/ di akhir suku kata tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Karena itulah bentuk satuan lingual kependekan *SIUPP* dan *BUMN* dilafalkan dengan /*siup*/ dan /*bum*/. Namun pelafalan bentuk satuan lingual kependekan *BUMN* seperti contoh nomor (4a) di atas dapat dapat dilafalkan dengan pengejaan huruf-huruf (ortografis).

Fenomena penjejeran dua fonem di akhir suku kata yang tidak sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia terdapat pula pada bentuk satuan lingual kependekan *UNAND* < *Universitas Andalas*. Dalam ragam lisan bentuk satuan lingual kependekan *UNAND* adalah /unan/. Perbedaan ini juga disebabkan penjejeran dua fonem /-nd/ di akhir suku kata tidak terdapat dalam bahasa Indonesia.

Bentuk-bentuk satuan lingual kependekan yang tidak sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia juga terdapat pada bentuk satuan lingual kependekan yang hanya terdiri dari konsonan saja. Dengan pola pengambilan fonem-fonem awal kelompok kata yang dipendekkan sering menghasilkan bentuk satuan lingual kependekan yang terdiri dari penjejeran konsonan-konsonan. Bentuk satuan lingual kependekan yang tidak sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia karena pembentukannya dilakukan dengan pengambilan fonem-fonem awal berupa konsonan, pelafalannya harus dilakukan dengan pengejaan huruf-huruf (ortografis) sebagai silabelnya. Dengan pengejaan tersebut, pelafalannya dapat sesuai dengan silabel kosa kata bahasa Indonesia.

#### **4.1.3 Penghilangan /ə/ (pepet) dari Bentuk Asalnya**

Fenomena kebahasaan yang terdapat dalam proses pemendekan, yakni adanya penghilangan /ə/ (pepet) dalam bentuk satuan lingual kependekan yang dihasilkan. Dua silabel dari salah satu satuan lingual (kata) yang dipendekkan dijadikan satu silabel dengan menghilangkan fonem /ə/ (pepet) yang ada dalam dua silabel yang diambil itu. Penghilangan fonem /ə/ (pepet) ini dalam

pembentukan satuan lingual kependekan dapat dijelaskan berdasarkan contoh data nomor (5) berikut ini.

- (5) Sehari sebelumnya, di Jakarta, Sekjen { Departemen Dalam Negeri } Feisal Tamin mengumumkan bahwa Presiden BJ Habibie memutuskan Sultan HB X menjadi Gubernur DIY.

(Kompas 30-9-1998 hal. 8)

Dalam contoh kalimat nomor (5) di atas, terdapat bentuk satuan lingual kependekan *Depdagri* yang dapat saling menggantikan dengan bentuk kelompok kata *Departemen Dalam Negeri*. Karena itu, bentuk satuan lingual kependekan *Depdagri* dapat berdiri sendiri dalam tuturan dan memiliki makna sendiri sehingga bentuk satuan lingual kependekan itu dapat dipandang sebagai kata. Jika dilihat dari segi pembentukannya, satuan lingual kependekan *Depdagri* < **D**epartemen **D**alam **N**egeri.

Proses pemendekan seperti di atas, menunjukkan dua silabel akhir dari satuan lingual kata *negeri* dijadikan satu silabel dalam membentuk satuan lingual kependekan. Dengan demikian, pada bentuk satuan lingual kependekan *Depdagri*, silabel akhir *-gri* sebenarnya berasal dari dua silabel yakni silabel *ge+ri* yang diambil dari kata *negeri*. Proses penghilangan fonem /ə/ (pepet) itu dalam pembentukan satuan lingual kependekan dilakukan karena dalam kata-kata bahasa Indonesia fonem /ə/ (pepet) itu dalam pelisannya sering menjadi zero atau hilang (Bandingkan dengan Lapoliwa, 1981:31).

Dalam bahasa Indonesia kata-kata yang memiliki fonem /ə/ (pepet) seperti kata *negari*, *kelompok*, *kelas*, *emas*, *karena* sering dalam pelisanaan dihilangkan, sehingga kata-kata itu dilisankan dengan [negri], [klompok], [klas], [mas],



[karna]. Kaidah penghilangan fonem /ə/ (pepet) dalam pelisanan bahasa Indonesia dijabatkan dan dimanfaatkan dalam pembentukan satuan lingual kependekan tersebut. Karena itulah, bentuk kelompok satuan lingual *Departemen Dalam Negeri* dipendekkan menjadi *Depdagri* [*depdagri*] dengan penghilangan fonem /ə/ (pepet) dari silabel *-geri* yang terdapat dalam kata *negeri*.

Penghilangan fonem /ə/ (pepet) dalam pembentukan kependekan seperti itu terdapat pula seperti dalam contoh data nomor (6) berikut ini.

- (6) Pelantikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak ada masalah karena  $\left. \begin{array}{c} \text{Mendagri} \\ \text{Menteri Dalam Negeri} \end{array} \right\}$  berwenang untuk itu.  
(Berita Nusantara II RRI Yogyakarta pukul 20.30 Wib, 1-10-1998)

Pada contoh kalimat nomor (6) di atas, terdapat pula bentuk satuan lingual kependekan *Mendagri* yang dapat saling menggantikan dengan bentuk kelompok kata *Menteri Dalam Negeri*. Jadi dapat dikatakan bahwa bentuk satuan lingual kependekan *Mendagri* dapat berdiri sendiri dalam tuturan dan memiliki makna sendiri. Artinya bentuk satuan lingual kependekan *Mendagri* itu sudah dipandang sebagai kata dalam bahasa Indonesia. Jika ditilik dari segi pembentukannya, bentuk satuan lingual kependekan *Mendagri* < **M**enteri **D**alam Negeri (gabungan silabel awal dengan silabel awal dan dengan dua silabel akhir)

Seperti proses pemendekan dalam contoh *Depdagri* di atas, proses pemendekan *Mendagri* menunjukkan adanya dua silabel akhir dari satuan lingual *negeri* dijadikan satu silabel untuk membentuk satuan lingual kependekan itu, sedangkan satuan lingual *menteri* dan satuan lingual *dalam* diambil silabel-silabel awalnya. Dengan demikian bentuk satuan lingual kependekan *Mendagri*, silabel

akhir *-gri* berasal dari dua silabel yakni silabel *geri* yang diambil dari kata *negeri*. Oleh karena kaidah penghilangan fonem /ə/ (pepet) dalam pelisanan bahasa Indonesia diwajibkan dan dimanfaatkan dalam pembentukan satuan lingual kependekan tersebut, maka bentuk kelompok satuan lingual *Menteri Dalam Negeri* dipendekkan menjadi *Depdagri* dengan penghilangan fonem /ə/ (pepet) dari silabel *-geri* yang terdapat dalam kata *negeri*.

Proses penghilangan fonem /ə/ (pepet) dalam pembentukan satuan lingual kependekan terdapat pula dalam contoh data nomor (7) berikut ini.

(7) Jamaah haji { Kelompok Terbang }  
                  { kloter } pertama telah diberangkatkan  
                  dan disaksikan Menteri Agama Republik Indonesia.

Pada contoh kalimat nomor (7) di atas, bentuk satuan lingual kependekan *kloter* [*kloter*] dapat saling menggantikan dengan bentuk gabungan satuan lingual *Kelompok Terbang*. Jadi, bentuk satuan lingual kependekan *kloter* dapat berdiri sendiri dalam tuturan dan memiliki makna sendiri. Bentuk satuan lingual kependekan *kloter* dalam bahasa Indonesia adalah kata. Ditinjau dari segi pembentukannya, bentuk satuan lingual kependekan *kloter* [*kloter*] < *Kelompok Terbang*.

Pada proses pemendekan *kloter*, kelompok fonem awal dari satuan lingual *kelompok* dijadikan satu silabel untuk membentuk satuan lingual kependekan, sedangkan satuan lingual *terbang* diambil silabel awalnya. Dengan demikian dalam bentuk satuan lingual kependekan *kloter*, silabel awal *klo-* sebenarnya berasal dari kelompok fonem *kelo* yang diambil dari kata *kelompok*. Oleh karena kaidah penghilangan fonem /ə/ (pepet) dalam pelisanan bahasa Indonesia diwajibkan dan dimanfaatkan dalam pembentukan satuan lingual kependekan tersebut, maka

bentuk kelompok satuan lingual *Kelompok Terbang* dipendekkan menjadi *kloter* dengan penghilangan fonem /ə/ (pepet).

Singkatnya, proses penghilangan fonem /ə/ (pepet) dalam pembentukan satuan lingual kependekan, bertolak dari adanya kaidah fonem /ə/ (pepet) dalam kata-kata bahasa Indonesia yang dalam pelisanan sering menjadi zero atau hilang. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kata-kata yang memiliki fonem /ə/ (pepet) seperti kata *negara*, *kelompok*, *kelas*, *emas*, *karena* yang dalam pelisannya sering dihilangkan. Jadi kata-kata itu bila dilisankan akan terdengar [*negri*], [*klompok*], [*klas*], [*mas*], [*karna*]. Kaidah penghilangan fonem /ə/ (pepet) dalam pelisanan bahasa Indonesia, dijabatkan dan dimanfaatkan dalam pembentukan satuan lingual kependekan tersebut.

## **4.2 Fenomena-fenomena Kebahasaan dalam Pemendekan pada Tataran Morfologi**

### **4.2.1 Pemendekan atas Bentuk Satuan Lingual Kependekan**

Dalam bahasa Indonesia ditemukan fenomena pemendekan yang dilakukan terhadap bentuk satuan lingual yang di antaranya adalah bentuk satuan lingual kependekan. Hal itu menunjukkan adanya proses pemendekan terhadap bentuk satuan lingual kependekan. Fenomena kebahasaan seperti itu seringkali dibicarakan oleh masyarakat pemakai bahasa Indonesia. Pertanyaan yang sering muncul atas fenomena tersebut adalah “kenapa dalam bahasa Indonesia terdapat pula pemendekan atas bentuk satuan lingual kependekan?”. Karena itu, fenomena

kebahasaan tersebut perlu dibicarakan dan dijelaskan. Fenomena kebahasaan itu akan dibicarakan berdasarkan contoh data nomor (8) berikut ini.

- (8) Menurut  $\left. \begin{array}{l} \text{Panglima Abri} \\ \text{Pangab,} \end{array} \right\}$  ABRI sebenarnya lebih suka apabila Kongres PDI Megawati dilakukan di tempat lain.  
(Kompas, 30-9-1998, hal. 1)

Pada contoh data nomor (8) di atas, terdapat bentuk satuan lingual kependekan *Pangab* [*paŋab*] yang dapat digantikan oleh bentuk satuan lingual *Panglima Abri*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua bentuk itu dapat saling menggantikan karena bentuk satuan lingual kependekan *Pangab* [*paŋab*] berasal dari bentuk satuan lingual *Panglima Abri*. Jika dilihat dari proses pembentukannya, bentuk satuan lingual kependekan *Pangab* [*paŋab*] berasal dari dua bentuk satuan lingual (kata) yakni *Panglima Abri*.

Berdasarkan data itu, bentuk satuan lingual *Panglima* adalah bentuk satuan lingual yang berupa kata, sedangkan bentuk satuan lingual *Abri* merupakan bentuk satuan lingual kependekan. Karena itu, proses pembentukan bentuk satuan lingual kependekan *Pangab* di atas, menunjukkan fenomena pemendekan atas bentuk satuan lingual kependekan. Bentuk satuan lingual kependekan *ABRI* dipendekkan bersama bentuk satuan lingual kata *Panglima* dalam menghasilkan bentuk satuan lingual kependekan *Pangab* tersebut.

Bentuk satuan lingual kependekan *Pangab*, pada dasarnya tetap sebagai bentuk pemendekan atas dua satuan lingual yang berupa kata. Hal tersebut berdasarkan penjelasan terdahulu tentang bentuk satuan lingual kependekan sebagai bentuk satuan lingual yang telah berstatus sebagai kata. Dengan demikian

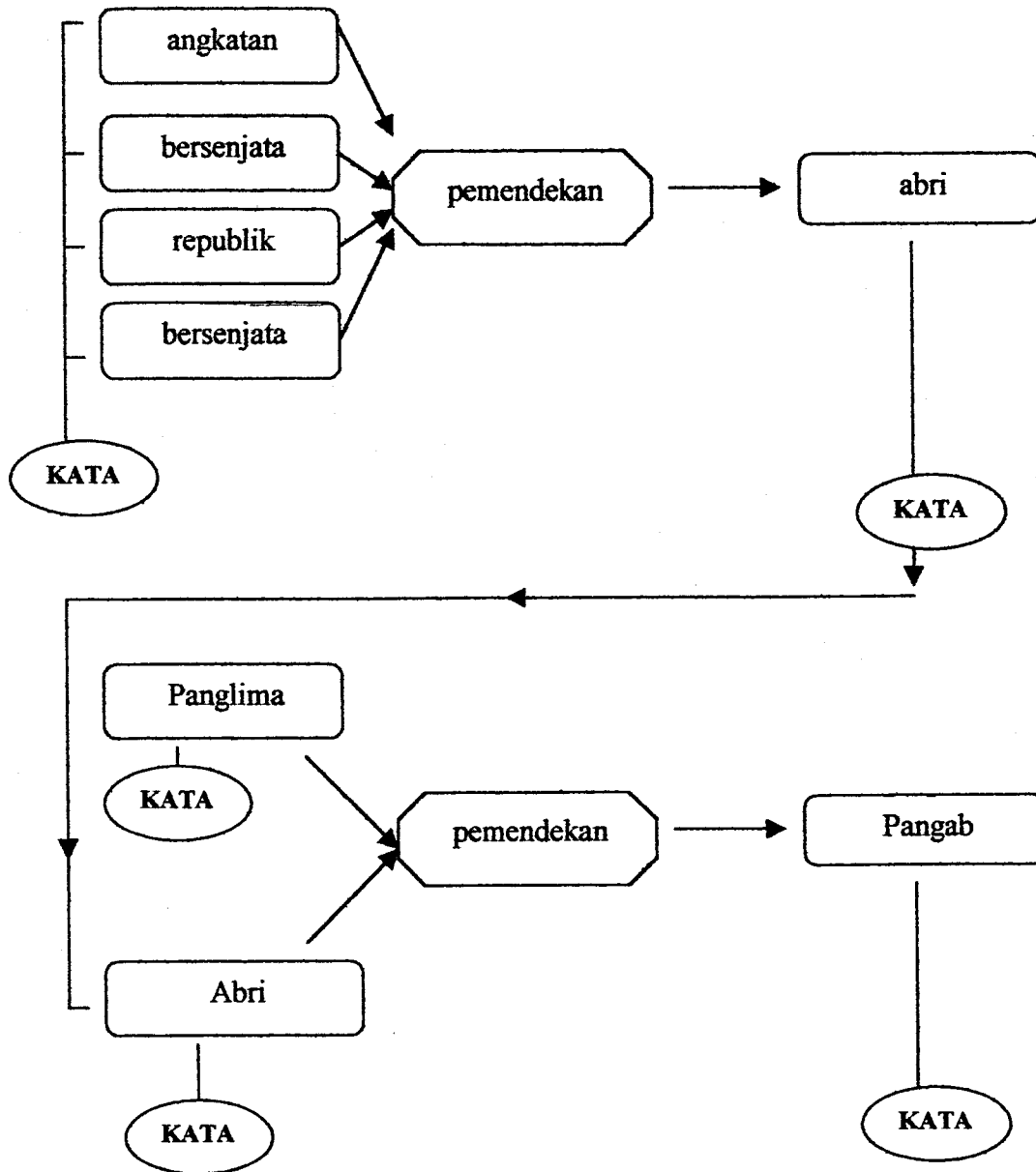
bentuk satuan lingual *Abri* dalam bentuk *Panglima Abri* adalah berstatus kata. Singkatnya bentuk satuan lingual *Abri* adalah kata.

Walaupun bentuk satuan lingual *Abri* berasal dan memiliki makna yang sama dengan bentuk satuan lingual *Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, namun bentuk satuan lingual *Abri* telah memiliki makna tersendiri dan telah digunakan dalam tuturan. Jadi, bentuk satuan lingual *Abri* sebagai sebuah kata, dapat pula dilihat pada contoh data nomor (9) berikut ini.

- (9) Jadi, anggota  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Angkatan Bersenjata Republik Indonesia} \\ \text{Abri} \end{array} \right\}$  belum memiliki sikap mental yang sebenarnya menjadi prasyarat seorang hakim.  
(Kompas, 7-10-1998, hal. 15)

Bentuk satuan lingual *Abri* jelaslah sebagai sebuah kata, karena dalam kalimat (9) bentuk satuan lingual *Abri* dapat berdiri sendiri dalam tuturan dan dapat pula saling menggantikan dengan bentuk satuan lingual-satuan lingual *Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*. Untuk memahami fenomena kebahasaan tersebut dapat dilihat pada bagan nomor (1) berikut ini.

Bagan 1. Fenomena Kebahasaan Pembentukan Satuan Lingual Kependekan yang Berasal dari Salah Satu Bentuk Satuan Lingual Kependekan



Fenomena kebahasaan yang sama dengan fenomena kebahasaan di atas yakni dapat pula dilihat pada bentuk satuan lingual kependekan *BIA* yang terdapat dalam contoh data nomor (10) berikut ini.

- (10) Mantan Kepala  $\left. \begin{array}{l} \text{Badan Intelijen Abri} \\ \text{BIA} \end{array} \right\}$  Mayjen Purn. Syazen Siregar mengadakan Direktur American Expres Bank cabang Singapura ke Polda Metro Jaya.

Pada contoh data nomor (10) di atas terdapat bentuk satuan lingual kependekan *BIA* yang dapat digantikan oleh bentuk satuan lingual *Badan Intelijen Abri*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua bentuk itu dapat saling menggantikan karena bentuk satuan lingual kependekan *BIA* berasal dari bentuk satuan-satuan lingual *Badan Intelijen Abri*. Dari proses pembentukannya, bentuk satuan lingual kependekan *BIA* berasal dari tiga bentuk satuan lingual kata yakni *Badan Intelijen Abri*.

Berdasarkan data itu, bentuk satuan-satuan lingual yang membentuk satuan lingual kependekan *BIA*, seperti satuan lingual *abri* memiliki perbedaan dengan satuan lingual *Badan* dan *Intelijen*. Bentuk satuan lingual *Badan* dan *Intelijen* adalah bentuk satuan lingual kata, sedangkan bentuk satuan lingual *Abri* merupakan bentuk satuan lingual kependekkan. Karena itu, --seperti fenomena kebahasaan pada bentuk satuan lingual *Pangab*-- proses pemendekan tersebut menunjukkan adanya fenomena pemendekan atas bentuk satuan lingual kependekan. Padahal proses pemendekan tersebut pada dasarnya tetap sebagai proses pemendekan atas tiga satuan lingual yang berupa kata. Bentuk satuan lingual *Abri* dalam bentuk satuan lingual *Badan Intelijen Abri* adalah berstatus kata. Singkatnya bentuk satuan lingual *Abri* adalah kata.

Jadi, proses pemendekan seperti pada bentuk *Pangab* [*paŋab*] yang berasal dari bentuk satuan lingual-satuan lingual *Panglima* dan *Abri*, atau proses

pemendekan pada bentuk *BIA* yang berasal dari bentuk satuan lingual-satuan lingual *badan*, *intelijen* dan *abri*, bukanlah sebagai proses pemendekan atas kependekan. Proses pemendekan seperti pada bentuk satuan lingual kependekan *Pangab* [*paɾab*] dan *BIA* [*bia*] adalah proses pemendekan terhadap satuan lingual-satuan lingual yang berupa kata dan menghasilkan bentuk satuan lingual kependekan yang baru yang juga berstatus sebagai kata. Dengan demikian bentuk *abri* yang ikut membentuk satuan lingual kependekan yang baru seperti *Pangab* atau *BIA* adalah sebagai sebuah kata.

#### **4.2.2 Bentuk Satuan Lingual Kependekan yang Homonim**

Perkembangan pemendekan yang pesat dalam bahasa Indonesia menghasilkan banyak bentuk satuan lingual kependekan. Bentuk-bentuk satuan lingual kependekan yang ada memperlihatkan fenomena kebahasaan satuan lingual kependekan yang memiliki bentuk yang sama. Kesamaan bentuk satuan lingual kependekan itu ternyata tidak membingungkan para penutur bahasa Indonesia. Persamaan bentuk satuan lingual kependekan dan secara semantik memiliki perbedaan dapat digunakan oleh para penutur bahasa Indonesia tanpa mengganggu proses komunikasi. Hal ini disebabkan penutur memahami makna bentuk satuan lingual-satuan lingual kependekan yang sama dan memahami konteks penggunaannya.

Pembicaraan bentuk satuan lingual-satuan lingual yang memiliki kesamaan bentuknya dijelaskan berdasarkan contoh nomor (11) – (12) berikut ini.



(11) Takut akan  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Drop Out} \\ DO, \end{array} \right\}$  siswa SMK gantung diri.  
(Bernas, 25-9-1998, hal. 3)

(12) Sedangkan Operasi Pasar Murni yang dilakukan Dolog seharusnya dikurangi karena hanya sebagai ajang jual beli  $\left\{ \begin{array}{l} DO. \\ \text{Delivery Order} \end{array} \right\}$   
(Berita Nusantara II RRI Yogyakarta, pukul 20.30 WIB, 26-9-1998)

Pada contoh data nomor (11) dan (12) di atas terdapat dua bentuk satuan lingual kependekan yang sama yakni bentuk satuan lingual *DO* pada data nomor (11) dan bentuk satuan lingual *DO* pada data nomor (12). Pada data nomor (11) bentuk satuan lingual kependekan *DO* < *Drop Out*, sedangkan pada data nomor (12) bentuk satuan lingual kependekan *DO* < *Delivery Order*. Dengan demikian kedua bentuk satuan lingual kependekan tersebut memiliki perbedaan makna.

Penggunaan satuan lingual kependekan yang memiliki kesamaan bentuk ini, seperti bentuk satuan lingual *DO* yang bermakna sama dengan *Drop Out* dan bentuk satuan lingual *DO* yang bermakna sama dengan *Delivery Order*, dapat digunakan penutur sesuai dengan konteks pembicaraannya dan makna yang dimilikinya. Bentuk satuan lingual *DO* yang sama dengan bentuk satuan lingual *Drop Out* jelas secara semantis berhubungan dengan masalah pendidikan sedangkan bentuk satuan lingual *DO* yang sama dengan bentuk satuan lingual *Delivery Order* secara semantis berhubungan pula dengan masalah distribusi sembako. Dengan demikian penutur bahasa Indonesia akan dapat menggunakan satuan lingual kependekan yang sama bentuknya dan berbeda maknanya itu sesuai konteks atau permasalahan yang dikomunikasikan. Jadi dua bentuk satuan lingual kependekan yang berbeda maknanya tidaklah mengganggu proses komunikasi

karena dapat digunakan dan dipahami oleh penutur sesuai dengan konteks dan masalah yang dibicarakan.

Untuk membuktikan penggunaan satuan lingual kependekan yang sama bentuknya dan berbeda maknanya dapat dilihat pada contoh data nomor (13) berikut ini.

(13) Dua puluh orang mahasiswa di Universitas Gadjah Mada tahun 1998/1999 terancam *DO*.

Bentuk satuan lingual kependekan *DO* pada contoh data nomor (13) di atas akan dipahami oleh penutur dengan *Drop Out* karena berhubungan dengan masalah pendidikan. Sebaliknya bentuk satuan lingual kependekan *DO* tidak akan mungkin dipahami oleh penutur dengan *Delivery Order*. Hal itu dapat dibuktikan dengan contoh nomor (13a) berikut ini.

(13a) Dua puluh orang mahasiswa di Universitas Gadjah Mada tahun 1998/1999 terancam { *DO*,  
Drop Out  
\*Delivery Order }

Perkembangan pemendekan dalam bahasa Indonesia akhir-akhir ini, menunjukkan pula bentuk satuan lingual kependekan yang lebih dari dua dan memiliki makna yang berbeda. Berikut ini dikemukakan tiga bentuk satuan lingual kependekan yang sama dengan makna yang berbeda seperti pada data nomor (14) – (16).

(14) Bill Richardson, Dubes AS di { Perserikatan Bangsa-Bangsa  
*PBB*, } bisa jadi merupakan warga Amerika keturunan Meksiko pertama yang memegang jabatan tingkat tinggi dalam pemerintah AS.

(Jawa Pos, 27-9-1998)

(15) Target penerimaan  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} \\ \text{PBB} \end{array} \right\}$  Kabupaten Tangerang yang mencapai Rp. 51 Milyar untuk periode tahun 1997/1998 tersendat. (Republika 1-10-1998, hal. 8)

(16) Sikap  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Partai Bulan Bintang} \\ \text{PBB} \end{array} \right\}$  jelas, kalau ada gerakan inskonstitusional akan ditentang, menjatuhkan pemerintah yang ada namanya makar. (Kedaulatan Rakyat, 5-10-1998, hal. 1)

Pada contoh data nomor (14) dan (16) di atas terdapat tiga bentuk satuan lingual kependekan yang sama yakni bentuk satuan lingual *PBB* pada data nomor (14), (15) dan (16). Pada data nomor (14) bentuk satuan lingual kependekan *PBB* < *Perserikatan Bangsa-Bangsa*, pada data nomor (15) bentuk satuan lingual kependekan *PBB* < *Pajak Bumi dan Bangunan*, sedangkan pada data nomor (16) bentuk satuan lingual kependekan *PBB* < *Partai Bulan Bintang*. Berdasarkan pada bentuk-bentuk satuan lingual kata yang dipendekkan tersebut, ketiga bentuk satuan lingual kependekan di atas memiliki perbedaan makna.

Ditilik dari segi penggunaannya, ketiga satuan lingual kependekan yang memiliki kesamaan bentuk itu dapat digunakan penutur sesuai dengan konteks pembicaraannya dan makna yang dimiliki bentuk satuan lingual tersebut. Bentuk satuan lingual kependekan *PBB* yang sama dengan bentuk satuan lingual *Perserikatan Bangsa-Bangsa* jelas secara semantis berhubungan dengan masalah organisasi bangsa-bangsa di dunia, dan bentuk satuan lingual kependekan *PBB* yang sama dengan bentuk satuan lingual *Pajak Bumi dan Bangunan* jelas secara semantis berhubungan dengan masalah perpajakan di Indonesia, sedangkan bentuk satuan lingual kependekan *PBB* yang sama dengan bentuk satuan lingual *Partai Bulan Bintang* jelas secara semantis berhubungan dengan masalah kepartaian di

Indonesia. Dengan demikian penutur bahasa Indonesia akan dapat menggunakan satuan lingual kependekan yang sama bentuknya dan berbeda maknanya itu sesuai konteks atau permasalahan yang dikomunikasikan. Jadi tiga bentuk satuan lingual kependekan yang berbeda maknanya tidaklah mengganggu proses komunikasi karena dapat digunakan dan dipahami oleh penutur sesuai dengan konteks dan masalah yang dibicarakan.

Adanya tiga bentuk satuan lingual kependekan yang sama dan berbeda maknanya dapat dipahami dan digunakan penutur secara baik sesuai dengan makna yang dimiliki bentuk satuan lingual kependekan tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dengan contoh nomor (14a) – (16a) berikut ini.

(14a) Bill Richardson, Dubes AS di  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Perserikatan Bangsa-Bangsa} \\ \text{PBB,} \\ \text{*Pajak Bumi dan Bangunan} \\ \text{*Partai Bulan Bintang} \end{array} \right\}$  bisa jadi merupakan warga Amerika keturunan Meksiko pertama yang memegang jabatan tingkat tinggi dalam pemerintah AS.

(15a) Target penerimaan  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} \\ \text{PBB} \\ \text{*Perserikatan Bangsa-Bangsa} \\ \text{*Partai Bulan Bintang} \end{array} \right\}$  Kabupaten Tangerang yang mencapai Rp. 51 Milyar untuk periode tahun 1997/1998 tersendat.

(16a) Sikap  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Partai Bulan Bintang} \\ \text{PBB} \\ \text{*Perserikatan Bangsa-Bangsa} \\ \text{*Pajak Bumi dan Bangunan} \end{array} \right\}$  jelas, kalau ada gerakan inskons-  
titusional akan ditentang, menjatuhkan pemerintah yang ada namanya makar.

Pada contoh nomor (14a) – (16a) di atas terdapat tiga bentuk satuan lingual kependekan yang sama dan akan memiliki makna yang berbeda karena berasal dari bentuk satuan lingual yang berbeda pula.

Bentuk-bentuk satuan lingual kependekan *PBB* yang sama dan berasal dari tiga bentuk satuan lingual seperti *Perserikatan Bangsa-Bangsa*, *Pajak Bumi dan Bangunan*, *Partai Bulan Bintang* haruslah digunakan dan dipahami secara tepat sesuai dengan makna yang dimilikinya. Jika pemahaman atas ketiga bentuk satuan lingual kependekan *PBB* tidak sesuai dengan makna yang dimilikinya maka ujaran itu menjadi tidak berterima. Bentuk satuan lingual kependekan *PBB* pada contoh nomor (14a) tidak bisa dipahami sebagai *Pajak Bumi dan Bangunan* dan *Partai Bulan Bintang*. Ketidakberterimaan itu disebabkan oleh konteks dan permasalahan yang dibicarakan adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian pula bentuk satuan lingual *PBB* pada contoh nomor (15a), tidak bisa dipahami sebagai *Perserikatan Bangsa-Bangsa* dan *Partai Bulan Bintang*. Ketidakberterimaan itu disebabkan oleh konteks dan permasalahan yang dibicarakan adalah pendapatan pajak. Demikian juga dengan bentuk satuan lingual *PBB* pada contoh nomor (16a), tidak bisa dipahami sebagai *Perserikatan Bangsa-Bangsa* dan *Pajak Bumi dan Bangunan*. Ketidakberterimaan itu disebabkan oleh konteks dan permasalahan yang dibicarakan adalah sikap kepartaian.

Persamaan bentuk satuan lingual kependekan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ada pula memiliki makna yang konotasinya oleh masyarakat dianggap jelek. Pada sisi lain bentuk satuan lingual kependekan itu memiliki makna yang konotasinya oleh masyarakat dianggap bermanfaat. Bentuk satuan

lingual kependekan tersebut misalnya bentuk satuan lingual kependekan *KKN* yang berasal atau sama dengan bentuk satuan lingual *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* dan bentuk satuan lingual kependekan *KKN* yang berasal atau sama dengan bentuk satuan lingual *Kuliah Kerja Nyata*. Kedua bentuk ini secara kebahasaan tidak akan mengganggu proses komunikasi para penutur bahasa Indonesia karena kedua bentuk itu dapat digunakan dan dipahami para penutur sesuai dengan konteks dan permasalahan yang diembannya.

Pembicaraan masalah di atas dapat dijelaskan berdasarkan contoh data nomor (17) – (18) berikut ini.

(17) Jika praktek  $\left. \begin{array}{l} \text{Korupsi, Kolusi dan Nepotisme} \\ \text{KKN} \end{array} \right\}$  di PDAM tidak segera diakhiri, lambat atau cepat akan menghancurkan nama besar perusahaan itu.  
(Jawa Pos 27-9-1998, hal. 9)

(18) Program  $\left. \begin{array}{l} \text{Kuliah Kerja Nyata} \\ \text{KKN} \end{array} \right\}$  ini diikuti 250 mahasiswa yang telah diberi bekal dan akan disebar 10 Oktober mendatang pada seluruh desa di kabupaten Donggala.  
(Kompas 7-10-1998, hal. 8)

Pada contoh data nomor (17) dan (18) di atas terdapat dua bentuk satuan lingual kependekan yang sama yakni bentuk satuan lingual *KKN* pada data nomor (17), dan (18). Pada data nomor (17) bentuk satuan lingual kependekan *KKN* < *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, dan pada data nomor (18) bentuk satuan lingual kependekan *KKN* < *Kuliah Kerja Nyata*. Kedua bentuk satuan lingual kependekan di atas memiliki makna yang berbeda. Bentuk satuan lingual kependekan *KKN* yang sama dengan bentuk satuan lingual *Kuliah Kerja Nyata* jauh lebih dahulu digunakan dalam bahasa Indonesia dan secara semantis oleh masyarakat penutur berkonotasi positif atau baik. Sebaliknya bentuk satuan lingual kependekan *KKN*

yang sama dengan bentuk satuan lingual *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* walaupun digunakan belum lama ini namun telah berkembang dalam bahasa Indonesia dan secara semantis dianggap masyarakat penutur berkonotasi negatif. Jadi kedua bentuk satuan lingual kependekan tersebut sudah menjadi bentuk satuan lingual kependekan yang sama dan sama-sama berstatus sebagai kata dalam bahasa Indonesia.

Walaupun kedua bentuk satuan lingual kependekan *KKN < Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* dan *KKN < Kuliah Kerja Nyata* secara semantis oleh masyarakat penutur memiliki konotasi makna yang saling bertentangan, namun tidak menimbulkan masalah secara kebahasaan. Penggunaan dua satuan lingual kependekan yang sama bentuknya dan berbeda maknanya itu, dapat dipahami dan digunakan penutur secara baik sesuai dengan makna yang dimiliki bentuk satuan lingual kependekan tersebut. Hal itu dapat dijelaskan berdasarkan contoh nomor (17a) – (18a) berikut ini.

(17a) Jika praktek  $\left. \begin{array}{l} \text{*Kuliah Kerja Nyata} \\ \text{Korupsi, Kolusi dan Nepotisme} \\ \text{KKN} \end{array} \right\}$  di PDAM tidak segera diakhiri, lambat atau cepat akan menghancurkan nama besar perusahaan itu.

(18a) Program  $\left. \begin{array}{l} \text{*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme} \\ \text{Kuliah Kerja Nyata} \\ \text{KKN} \end{array} \right\}$  ini diikuti 250 mahasiswa yang telah diberi bekal dan akan disebar 10 Oktober mendatang pada seluruh desa di kabupaten Donggala.

Pada contoh nomor (17a) – (18a) di atas terdapat dua bentuk satuan lingual kependekan yang sama namun memiliki makna yang berbeda karena berasal dari bentuk satuan lingual yang berbeda pula. Kedua bentuk satuan lingual yang sama

dan berbeda maknanya dapat digunakan dan dipahami oleh penutur bahasa Indonesia sesuai dengan makna yang dimilikinya berdasarkan konteks dan permasalahan yang dikomunikasikan dalam kalimat/ ujaran tersebut. Berdasarkan konteks kalimat dan permasalahan yang dikemukakan dalam contoh nomor (17a) di atas bentuk satuan lingual kependekan *KKN* tidak bisa dipahami sebagai bentuk satuan lingual *Kuliah Kerja Nyata*. Demikian pula dalam contoh nomor (18a) di atas bentuk satuan lingual kependekan *KKN* tidak bisa dipahami sebagai bentuk satuan lingual *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

Bertolak dari uraian di atas, dalam bahasa Indonesia ditemukan bentuk-bentuk satuan lingual kependekan yang sama namun memiliki perbedaan makna. Oleh karena bentuk satuan lingual kependekan tersebut adalah kata dalam bahasa Indonesia, maka bentuk satuan lingual yang sama dan berbeda makna ini dapat disebut sebagai bentuk yang homonim. Kata *homonim* berasal dari bahasa Yunani Kuno yakni *onoma* yang berarti nama dan *homo* yang berarti sama. Jadi homonim dapat diartikan bentuk satuan lingual yang bentuknya sama tetapi memiliki perbedaan makna (Pateda, 1995:174, Alwasilah, 1986:150, Chaer, 1995:93, Keraf, 1987:36). Ditilik dari segi penggunaannya kata-kata yang homonim tetap dapat digunakan dan dapat dipahami oleh penutur bahasa Indonesia sesuai dengan konteks dan permasalahan yang dibicarakan. Dengan demikian bentuk yang homonim tidaklah mengganggu proses komunikasi dalam bahasa Indonesia.



### 4.2.3 Bentuk Satuan Lingual Kependekan sebagai Bentuk Nama Utuh

Fenomena kebahasaan yang menarik ditemukan dalam bentuk-bentuk satuan lingual kependekan yang ada dalam bahasa Indonesia adalah adanya bentuk satuan lingual kependekan yang digunakan dalam ujaran/ kalimat yang diikuti atau didahului oleh salah satu unsur satuan lingual kata yang dipendekkan. Gejala kebahasaan seperti itu sepintas akan menunjukkan adanya pemubaziran kata. Banyak orang akan mengatakan bentuk ujaran/ kalimat yang seperti itu tidak hemat kata. Atau mungkin ada orang yang mengatakan bahwa penggunaan bentuk satuan lingual seperti itu tidak logis secara kebahasaan. Misalnya, dari aspek semantisnya.

Pembicaraan fenomena kebahasaan yang diungkapkan di atas, dapat dijelaskan berdasarkan contoh data nomor (19) – (21) berikut ini.

(19) Sementara itu, { *PSP* } { *Persatuan Sepakbola Padang* } Padang melakukan persiapan serius.  
(Jawa Pos 29-9-1998 hal. 16)

(20) Persyaratan deposito ini berlaku ketentuan deposito Bank { *BNI* } { *Bank Negara Indonesia* }  
( Lembar bilyet Deposito BNI)

(21) “Sekarang bukan zaman Soeharto, setiap partai bebas menentukan asasnya,”  
ujar Sri Bintang Ketua Partai { *PUDI* } { *Partai Uni Demokrasi Indonesia* }  
(Adil no. 52, 30 Sept-6 Okt 1998, hal 21)

Pada contoh data nomor (19) terdapat bentuk satuan lingual kependekan *PSP* < *Persatuan Sepakbola Padang*; pada contoh data nomor (20) terdapat bentuk satuan lingual kependekan *BNI* < *Bank Negara Indonesia*; dan pada contoh data nomor (21) terdapat bentuk satuan lingual *PUDI* < *Partai Uni Demokrasi*

*Indonesia*. Dalam contoh nomor (19) – (21) di atas, penggunaan bentuk satuan lingual kependekan tersebut didahului atau diikuti oleh salah satu bentuk satuan lingual yang dipendekkan. Hal itu ditemukan dalam kelompok kata *PSP Padang* pada contoh nomor (19); kelompok kata *Bank BNI* pada contoh nomor (20); dan kelompok kata *Partai PUDI* pada contoh nomor (21).

Penggunaan bentuk satuan lingual kependekan seperti di atas akan dikatakan tidak logis secara semantis apabila bentuk satuan lingual kependekan itu dikembalikan kepada bentuk asalnya. Hal itu terbukti dalam contoh nomor (19a) – (21a) di bawah ini tidak akan berterima pemakaiannya.

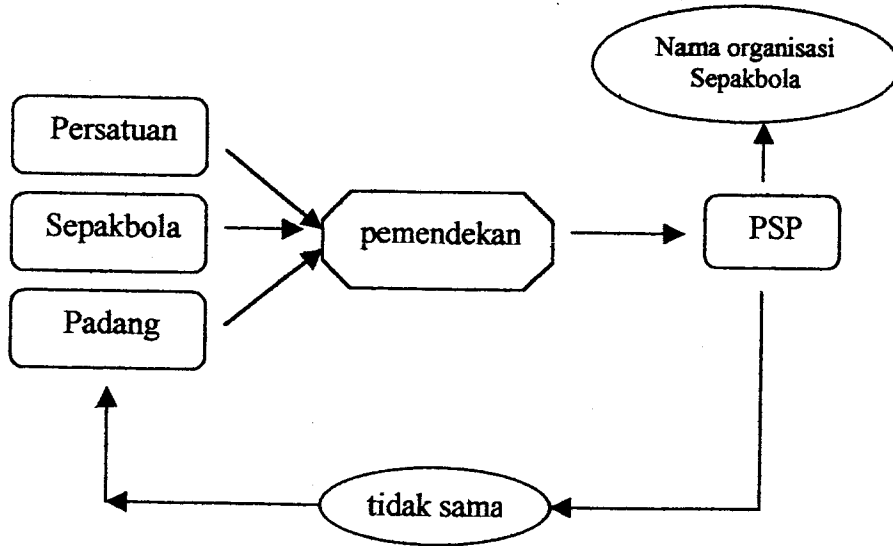
- (19a) \*Sementara itu, *Persatuan Sepakbola Padang* Padang melakukan persiapan serius.
- (20a) \*Persyaratan deposito ini berlaku ketentuan deposito Bank *Bank Negara Indonesia*.
- (21a) \*“Sekarang bukan zaman Soeharto, setiap partai bebas menentukan dasarnya,” ujar Sri Bintang Ketua Partai *Partai Uni Demokrasi Indonesia*.

Penggunaan bentuk satuan lingual kependekan pada contoh nomor (19) – (21) di atas pada dasarnya dapat dijelaskan dengan pertimbangan bahwa bentuk satuan lingual kependekan *PSP*, *BNI* dan *PUDI* merupakan sebuah nama suatu konsep atau referen yang utuh sebagai sebuah kata. Jadi bentuk satuan lingual kependekan *PSP* adalah nama sebuah organisasi sepakbola, *BNI* adalah nama sebuah bank dan *PUDI* adalah nama sebuah partai di Indonesia. Oleh karena bentuk satuan lingual kependekan *PSP*, *BNI* dan *PUDI* adalah bentuk satuan lingual kata yang harus diakui kemandiriannya sebagai sebuah nama maka bentuk satuan lingual kependekan itu tidaklah sama dengan salah satu unsur kata yang

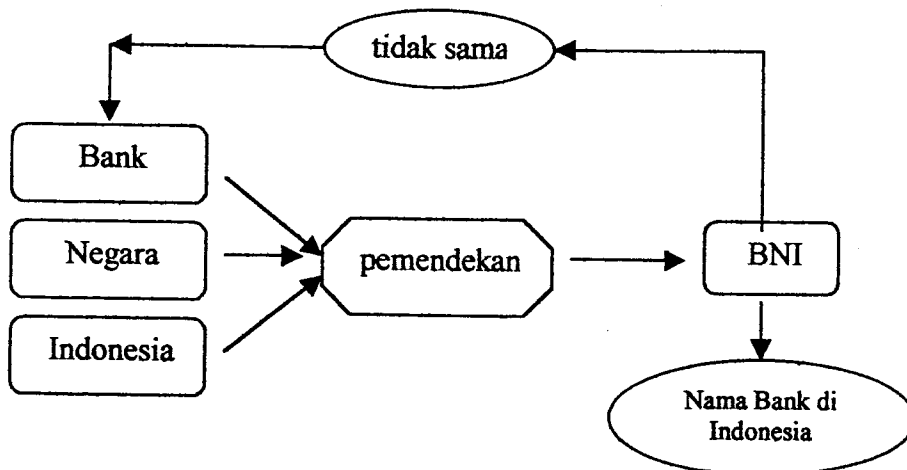
dipendekkan. Bentuk pemendekan seperti itu dapat digambarkan dengan bagan nomor (2) berikut ini.

*Bagan 2. Bentuk Pemendekan yang Menghasilkan Bentuk Satuan Lingual Kependekan sebagai Nama Utuh suatu Konsep/ Referen*

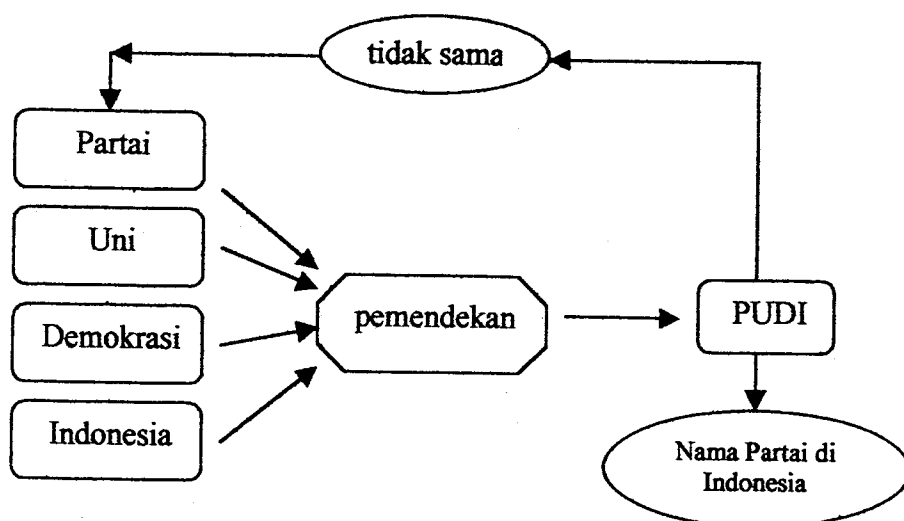
*Bagan 2.a*



*Bagan 2.b*



Bagan 2.c



Dengan demikian penggunaan kelompok kata *PSP Padang* dalam contoh nomor (19) di atas tidak memiliki permasalahan kebahasaan karena *PSP* adalah bentuk satuan lingual yang mengacu kepada nama suatu organisasi sepakbola di Padang. Begitu juga penggunaan kelompok kata *Bank BNI* dalam contoh nomor (20) di atas tidak memiliki permasalahan kebahasaan karena *BNI* adalah bentuk satuan lingual yang mengacu kepada nama lembaga sebuah bank. Demikian pula penggunaan kelompok kata *Partai PUDI* dalam contoh nomor (21) di atas tidak memiliki permasalahan kebahasaan karena *PUDI* adalah bentuk satuan lingual yang mengacu kepada nama suatu organisasi partai.

Bagaimana kalau bentuk satuan lingual yang sama dengan salah satu unsur yang membentuk satuan lingual kependekan tersebut --baik yang mendahului atau pun yang mengikutinya-- dihilangkan saja dalam ujaran/ kalimat? Hal tersebut dapat dibuktikan dengan contoh nomor (19b) – (21b) berikut ini.

(19b) Sementara itu, *PSP* melakukan persiapan serius.

(20b) Persyaratan deposito ini berlaku ketentuan deposito *BNI*.

(21b) "Sekarang bukan zaman Soeharto, setiap partai bebas menentukan asasnya," ujar Sri Bintang Ketua *PUDI*.

Keberterimaan ujaran atau kalimat pada nomor (19b) – (21b) tersebut bukanlah disebabkan penghilangan satuan lingual kata dalam kaitannya dengan bentuk satuan lingual kependekan tersebut. Keberterimaan ujaran atau kalimat pada nomor (19b) – (21b) tersebut berkaitan dengan gaya bahasa *sinekdode pars pro toto* yakni gaya bahasa semacam bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan (Keraf,1993:142). Jadi untuk menyebut *PSP Padang* cukup digunakan saja nama organisasinya yakni *PSP*, untuk menyebut *Bank BNI* cukup digunakan saja nama bank itu yakni *BNI*, untuk menyebut *Partai PUDI* cukup digunakan saja nama partai itu yakni *PUDI*.

#### **4.2.4 Fenomena Bentuk Satuan Lingual Kependekan yang Mengabaikan Salah Satu / Beberapa Kata dalam Pemendekan**

Fenomena kebahasaan yang menarik untuk dikaji yang ditemukan berdasarkan bentuk-bentuk satuan lingual kependekan dalam bahasa Indonesia adalah salah satu atau beberapa kata asal yang diabaikan dalam pembentukan satuan lingual kependekan. Pembicaraan fenomena tersebut dijelaskan berdasarkan contoh data nomor (22) dan (23) di bawah ini.

(22) { Menteri Luar Negeri }  
      { *Menlu* } Ali Alatas menjelaskan tidak mudah bagi Habibie untuk meninggalkan Indonesia karena urusan dalam negeri Indonesia sendiri.

(Kompas, 14 Oktober 1998 hal.1)

- (23) Menkes minta agar pengelola dana penelitian baik badan  
{*Litbang*  
Penelitian dan Pengembangan} maupun unit lain seperti direktorat jenderal  
untuk bekerja sama dan melakukan penelitian yang baik secara nasional.  
(Kompas, 7 Oktober 1998 hal.10)

Pada contoh data nomor (22) dan (23) di atas terdapat bentuk satuan lingual kependekan *Menlu* dan *litbang*. Ditilik dari segi pembentukannya, bentuk satuan lingual kependekan *Menlu* < *Menteri Luar Negeri*, *Litbang* < *Penelitian dan Pengembangan*. Berdasarkan pembentukannya, fenomena kebahasaan yang muncul adalah adanya pengabaian satuan lingual kata asal dalam pembentukan satuan lingual kependekan. Bentuk satuan lingual kependekan *Menlu* dibentuk dari satuan lingual kata *menteri* dan *luar*, sedangkan satuan lingual kata *negeri* diabaikan atau tidak –digunakan untuk pembentukan satuan lingual kependekan tersebut. Begitu pula bentuk satuan lingual kependekan *Litbang* dibentuk dari satuan lingual kata *penelitian* serta satuan lingual kata *pengembangan*, sedangkan satuan lingual kata *dan* tidak digunakan untuk pembentukan satuan lingual kependekan tersebut.

Fenomena kebahasaan yang mengabaikan salah satu atau beberapa satuan lingual kata asal dalam pembentukan satuan lingual kependekan terdapat pula dalam bentuk satuan lingual kependekan *Deplu* < *Departemen Luar Negeri*, *Toserba* < *Toko Serba Ada*. Bentuk satuan lingual kependekan tersebut dibentuk dengan mengabaikan salah satu kata dari frasa yang ada. Fenomena kebahasaan yang mengabaikan satuan lingual kata penghubung (konjungsi) *dan* terdapat pula pada banyak bentuk satuan lingual kependekan seperti *Diklat* < *Pendidikan dan*

*Latihan, Dikdasmen < Pendidikan Dasar dan Menengah, BKIA < Balai Kesehatan Ibu dan Anak.*

Pembentukan satuan lingual kependekan yang mengabaikan salah satu kata yang dipendekkan hanya terjadi pada bentuk-bentuk satuan lingual kependekan tertentu. Fenomena kebahasaan tersebut tidak terjadi secara umum. Misalnya, pengabaian satuan lingual kata *negeri* dalam pembentukan satuan lingual kependekan *Menlu < Menteri Luar Negeri*, tidak terjadi pada pembentukan satuan lingual kependekan *mendagri < Menteri Dalam Negeri*. Hal itu dapat dibuktikan dengan contoh nomor (24) di bawah ini.

(24) Anggaran tersebut lanjut { *Menteri Dalam Negeri*,  
*Mendagri*, } digunakan untuk biaya pegawai sebesar Rp. 423, 618 milyar, biaya barang sekitar Rp. 233,098 milyar, biaya operasi sekitar Rp. 299,5 milyar dan biaya lainlain dianggarkan sebesar RP. 5,652 milyar.

(Kompas, 7 Oktober 1998 hal.6)

Demikian pula, pengabaian satuan lingual kata penghubung (konjungsi) seperti satuan lingual kata *dan* umumnya terjadi pada pembentukan satuan lingual kependekan. Namun pengabaian satuan lingual kata *dan* tidak terjadi pada kelompok kata *dan sebagainya > dsb, dan lainlain > dll, dan seterusnya > dst.*

#### **4.2.5 Bentuk Satuan Lingual Kependekan *dr.* (Dokter) yang Tidak Sesuai dengan EYD**

Dalam perkembangan bentuk-bentuk satuan lingual kependekan yang ada dalam bahasa Indonesia, bentuk satuan lingual kependekan *dr.* merupakan bentuk yang masih problematis. Bentuk satuan lingual kependekan *dr.* dibentuk dari satuan lingual kata *Dokter*. Bentuk satuan lingual kependekan *dr.* dikatakan

problematis karena penulisannya tidak sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia. Bentuk satuan lingual kependekan *dr.* yang merupakan gelar akademik itu dituliskan dengan menggunakan huruf kecil. Hal itu menunjukkan ketidakkonsistenan penulisan gelar dalam bahasa Indonesia. Kenyataannya, alternatif pembakuan penulisan gelar akademik *dr.* ini belum dilakukan terutama oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Bentuk satuan lingual kependekan *dr.* sebagai gelar akademik sampai saat ini tetap digunakan dan berkembang dalam bahasa Indonesia. Pembicaraan hal itu dapat dijelaskan berdasarkan contoh data nomor (25) berikut ini.

(25) Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes  
Prof.  $\left. \begin{array}{l} \text{Dr.} \\ \text{Doktor} \end{array} \right\}$   $\left. \begin{array}{l} \text{dr.} \\ \text{Dokter} \end{array} \right\}$  Umar Fahmi Ashadi, M.P.H. kepada wartawan,  
saat ini ada dua macam pendekatan.

(Kompas 7-10-7998, hal.10)

Pada contoh data nomor (25) di atas, terdapat bentuk satuan lingual kependekan *dr.* < *Dokter* yang berbeda jika dibandingkan dengan satuan lingual kependekan *Dr* < *Dokter* (pada nomor 25 tersebut). Bentuk satuan lingual kependekan *dr.* yang sampai saat ini terus digunakan penutur bahasa Indonesia merupakan bentuk yang tidak sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia. Ketidaksesuaian bentuk satuan lingual kependekan tersebut adalah penulisan huruf awalnya dengan huruf kecil.

Bentuk satuan lingual kependekan *dr.* sebagai gelar akademik dikatakan problematis terutama jika dilihat berdasarkan EYD bahasa Indonesia. Dalam buku Ejaan Yang Disempurnakan (1998:9) dijelaskan penggunaan huruf kapital yang salah satunya (nomor 13) berbunyi: huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama



unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Demikian juga dalam buku Ejaan Yang Disempurnakan itu (1998:19) pada penulisan singkatan dan akronim nomor (1.a) disebutkan bahwa singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Bertolak dari pedoman penggunaan huruf kapital dan penulisan singkatan yang ada dalam EYD tersebut, maka penulisan gelar akademik *Dokter* mestinya dituliskan *Dr.* Jika gelar akademik *Dokter* dituliskan dengan bentuk satuan lingual kependekan *Dr.* maka bentuk ini menjadi bentuk yang sama dengan singkatan gelar akademik *Doktor* yang juga ditulis dengan *Dr.* Jika hal itu digunakan akan timbul permasalahan referen yang dituju bentuk satuan lingual kependekan itu. Hal ini disebabkan kedua bentuk satuan lingual kependekan ini sama-sama berkaitan dengan gelar akademik. Jadi kedua bentuk satuan lingual itu tidak bisa dijadikan bentuk yang homonim seperti yang dibicarakan pada subbab 6.2 sebelumnya. Bentuk satuan lingual yang homonim itu tidak menimbulkan masalah dalam komunikasi bila maknanya berada di lingkungan permasalahan yang berbeda.

Kedua bentuk satuan lingual kependekan tersebut sebelumnya dibedakan dengan bentuk singkatan *Dr.* (D huruf besar) untuk kata *Doktor*, dan bentuk singkatan *dr.* (d huruf kecil) untuk kata *Dokter*. Penggunaan gelar seperti *Dr.* dan *dr.* sampai saat ini tetap digunakan padahal bentuk singkatan *dr.* jelas tidak sesuai dengan EYD bahasa Indonesia. Pada tahun 1993 yang lalu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Keputusan Mendikbud Nomor 036/U/1993 dikeluarkan penertiban gelar dan sebutan akademik yang berlaku terhitung tanggal 9 Februari 1993. Kepmen tersebut ditujukan untuk

menertibkan kembali gelar akademik. Walaupun gelar sarjana kedokteran telah diganti dengan *S.Ked (Sarjana Kedokteran)* dalam Kepmen itu ternyata tidak menyelesaikan fenomena kependekan *dr.* tersebut dalam bahasa Indonesia. Penertibannya, dalam Kepmen tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa gelar akademik tersebut tidak diwajibkan penggunaannya bagi sarjana yang telah mendapat gelar sebelum tanggal 9 Februari 1993.

Oleh karena gelar akademik *Dokter* yang dilambangkan dengan *dr.* tetap digunakan dalam bahasa Indonesia, maka perlu dilakukan penertiban agar sesuai dengan EYD bahasa Indonesia. Bentuk satuan lingual kependekan *dr.* < Dokter sebagai kata menurut pengertian kata secara ortografis perlu dibedakan dengan bentuk satuan lingual kependekan *Dr.* < Doktor. Perbedaan bentuk satuan lingual kependekan tersebut tidaklah dengan mengorbankan EYD bahasa Indonesia seperti dilakukan selama ini.

Pemendekan gelar akademik *Doktor* dan *Dokter* dapat dilakukan dengan perbedaan pola pemendekan. Perbedaan itu dapat didasarkan pada pola-pola pemendekan yang telah dibicarakan pada subbab 5.1 dan secara khusus telah dibicarakan pada subbab 5.1.2.1 tentang pola pemendekan yang berasal dari satu kata. Untuk itu perbedaan penulisan gelar *Doktor* dan *Dokter*, pemendekannya dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. Doktor > Dr. (Sesuai dengan EYD bahasa Indonesia)

**Pola pemendekan** = pengambilan fonem pertama dan fonem akhir.

b. Dokter > Dtr. (Sesuai dengan EYD bahasa Indonesia)

**Pola pemendekan** = pengambilan fonem awal, tengah ditambah fonem akhir.

Berdasarkan alternatif pemendekan di atas, gelar akademik *Dokter* bisa ditertibkan kembali dengan alternatif *Dtr.* yang sesuai dengan EYD bahasa Indonesia dan sesuai dengan pola-pola pemendekan yang ditemukan dalam bahasa Indonesia. Pemasyarakatan gelar akademik *Dtr.* < *Dokter* sebagai pengganti bentuk *dr.* < *Dokter* yang tidak sesuai dengan EYD bahasa Indonesia terlebih dahulu perlu dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang dalam hal ini dimulai oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Dengan penggantian gelar akademik *dr.* dengan bentuk *Dtr.* maka permasalahan EYD tidak lagi terdapat untuk singkatan gelar akademik *Dokter* yang problematis selama ini dalam bahasa Indonesia.

#### **4.2.6 Bentuk Satuan Lingual Kependekan *Prof.* sebagai Singkatan dan *Prof* sebagai Penggalan**

Bentuk satuan lingual kependekan yang berasal dari satuan lingual kata *Profesor* ditemukan dua bentuk satuan lingual kependekan yakni *Prof.* (pakai titik) dan *Prof* (tanpa titik). Walaupun kedua bentuk satuan lingual kependekan tersebut berasal dari kata yang sama, namun kedua bentuk satuan lingual kependekan itu berbeda penulisannya. Perbedaan bentuk itu akan membedakan penggunaan dan fungsinya. Fenomena kebahasaan yang dimiliki dalam kedua bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* dan bentuk satuan lingual *Prof* belum pernah dikemukakan.

Pembicaraan bentuk satuan lingual kependekan itu dapat dijelaskan berdasarkan contoh data nomor (26) dan (27) berikut ini.

(26)  $\left. \begin{array}{l} \{ \text{Profesor} \} \\ \{ \text{Prof.} \} \end{array} \right\}$  Loebby Loeqman menilai ada 2 asumsi bila melihat kedatangan Soeharto ke Kejaksaan Agung.

(Kedaulatan Rakyat, 27-9-1998 hal.1)

(27) Selamat siang,  $\left. \begin{array}{l} \{ \text{Prof.} \} \\ \{ \text{Profesor} \} \end{array} \right\}$

Pada contoh data di atas, bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* pada data nomor (26) dari segi pemakaiannya sama dengan bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* pada data nomor (27). Kedua bentuk satuan lingual kependekan tersebut pada dasarnya berbeda jika data nomor (27) diuji dengan teknik balik seperti contoh nomor (27a) berikut ini.

(27a) *Prof.*, selamat siang.

Jadi dari segi bentuk penulisannya, bentuk satuan lingual kependekan pada data nomor (27) adalah *Prof.* (tanpa titik) seperti dibuktikan pada contoh nomor (27a). Karena itu penggunaan titik (.) pada bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* pada contoh data nomor (27) adalah tanda titik (.) sebagai akhir kalimat.

Perbedaan bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* (pakai titik) pada contoh data nomor (26) dengan bentuk satuan lingual *Prof.* (tanpa titik) pada contoh data nomor (27) memiliki perbedaan fungsi dan statusnya. Hal itu dapat diketahui jika dibandingkan dengan bentuk satuan lingual kependekan lain seperti contoh data nomor (28) – (33) berikut ini.

- (28)  $\left. \begin{array}{l} \text{Profesor} \\ \text{Prof.} \end{array} \right\}$  Loebby Loeqman menilai ada 2 asumsi bila melihat kedatangan Soeharto ke Kejaksaan Agung. (Kedulatan Rakyat, 27-9-9918 hal. 1)
- (29)  $\left. \begin{array}{l} \text{Doktor} \\ \text{Dr.} \end{array} \right\}$  Husein Umar menyatakan, jika tindakan pengusutan itu lambat dilakukan aparat dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi. (Bernas, 9-9-9918)
- (30) Selamat siang,  $\left. \begin{array}{l} \text{Prof.} \\ \text{Profesor} \end{array} \right\}$
- (31) *Prof*, selamat siang.
- (32) Selamat pagi,  $\left. \begin{array}{l} \text{Pak.} \\ \text{Bapak} \end{array} \right\}$
- (33) *Pak*, selamat pagi.

Berdasarkan contoh nomor (28) – (33) di atas, bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* < *Profesor* pada contoh data nomor (28) sama dengan bentuk satuan lingual kependekan *Dr.* < *Doktor* pada contoh data nomor (29) sebagai bentuk satuan lingual kependekan yang berupa gelar. Sedangkan bentuk satuan lingual kependekan *Prof* (tanpa titik) < *Profesor* pada contoh data nomor (30) dan (31) sama dengan bentuk satuan lingual kependekan *Pak* < *Bapak* pada contoh data nomor (32) dan (33) sebagai bentuk satuan lingual kependekan yang berupa sapaan. Jadi bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* (pakai titik) adalah bentuk satuan lingual kependekan sebagai gelar yang sama dengan bentuk satuan lingual kependekan lain seperti *Dr.*, *Ir.*, dan sebagainya. Bentuk satuan lingual kependekan *Prof* (tanpa titik) adalah bentuk satuan lingual kependekan sebagai bentuk sapaan yang sama dengan bentuk satuan lingual kependekan lain seperti *Pak*, *Bu*, *Dok*.

Perbedaan bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* (pakai titik) pada contoh data nomor (28) dengan bentuk satuan lingual *Prof* (tanpa titik) pada contoh data nomor (30) dapat pula dikaji statusnya sebagai kata. Jika bentuk satuan lingual kependekan pada contoh nomor (28) dan (33) dijadikan dalam bahasa Indonesia ragam lisan hasilnya adalah seperti dalam contoh nomor (28a) – (33a) berikut ini.

(28a)  $\left. \begin{array}{l} *[prof] \\ [Profesor] \end{array} \right\}$  Loebby Loeqman menilai ada 2 asumsi bila melihat kedatangan Soeharto ke Kejaksaan Agung.

(29a)  $\left. \begin{array}{l} *[Dr (de-er)] \\ [Doktor] \end{array} \right\}$  Husein Umar menyatakan, jika tindakan pengusutan itu lambat dilakukan aparat dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi.

(30a) Selamat siang, [Prof].

(31a) [Prof], selamat siang.

(32a) Selamat pagi, [Pak].

(33a) Pak], Selamat pagi.

Jika bentuk satuan lingual kependekan dalam bahasa Indonesia ragam tulis contoh data nomor (28) – (33) dibandingkan dengan bahasa Indonesia ragam lisannya seperti dalam contoh nomor (28a) – (33a) di atas terdapat dua gejala kebahasaan yang berbeda. **Pertama**, bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* dan *Dr.* pada contoh nomor (28) dan (29) dalam bahasa Indonesia ragam tulis akan menjadi [profesor] dan [dokter] dalam ragam lisan seperti dalam contoh nomor (28a) dan (29a). Jadi bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* dan *Dr.* tidak terdapat dalam bahasa Indonesia ragam lisan dan hanya terdapat dalam ragam tulis

saja. Karena itu bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* dan *Dr.* ini adalah berstatus sebagai kata menurut pengertian kata secara ortografis saja. Kedua, bentuk satuan lingual kependekan *Prof* (tanpa titik) dan *Pak* pada contoh nomor (30) dan (32) dalam bahasa Indonesia ragam tulis, akan berbentuk [prof] dan [pak] dalam ragam lisan seperti contoh nomor (30a) dan (32a). Jadi bentuk satuan lingual kependekan *Prof* dan *Pak* juga terdapat dalam bahasa Indonesia ragam lisan selain terdapat dalam bahasa Indonesia ragam tulis. Karena itu bentuk satuan lingual kependekan *Prof* dan *Pak* ini adalah berstatus sebagai kata baik menurut pengertian kata secara ortografis maupun menurut pengertian kata secara fonologis.

Bertolak dari pembuktian di atas, ada dua bentuk satuan lingual kependekan yang berasal dari pemendekan satuan lingual kata *Profesor*. Pertama, bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* (pakai titik) merupakan gelar akademik yang termasuk ke dalam jenis singkatan yang tidak dilafalkan. Kedua, bentuk satuan lingual kependekan *Prof* (tanpa titik) merupakan bentuk sapaan yang termasuk ke dalam jenis penggalan.

Bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* (pakai titik) hanya terdapat dalam bahasa Indonesia ragam tulis, sedangkan dalam ragam lisan digunakan bentuk asal satuan lingual kata yang dipendekkan yakni kata *Profesor* itu sendiri. Bentuk satuan lingual kependekan *Prof.* (pakai titik) ini sama dengan bentuk satuan lingual kependekan *Dr.*, *Ir.*, *Bpk.*, *Yth.* dan sebagainya termasuk dalam jenis singkatan yang tak pernah dilafalkan. Bentuk satuan lingual kependekan *Prof* (tanpa titik) sama dengan bentuk satuan lingual kependekan *Pak*, *Bu*, *Dok*





- (36) Pembina Korpri { Badan Pembina Penyelenggaraan Pelaksanaan  
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila } BP7  
Pusat Prof. Dr. M. Alwi Dahlan menyatakan Korpri harus mengembangkan diri sesuai dengan paradigma-paradigma baru.  
(Republika, 1-9-1998, hal. 2)

- (37) Usulan FPP sudah dipastikan gagal tentang penugasan Presiden untuk mengusut harta kekayaan Soeharto dan pejabat tinggi lainnya, penghapusan ABRI di DPR/MPR dan penghapusan { [P4 (pe-empat)].  
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila }  
(Berita Pagi RCTI, pukul 06.00 WIB, 2-9-1998)

Pada contoh data nomor (34) – (37) di atas terdapat beberapa bentuk satuan lingual kependekan seperti *RUU* < Rancangan Undang-Undang, *KTT* < Konferensi Tingkat Tinggi, *BP7* < Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, *P4* < Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

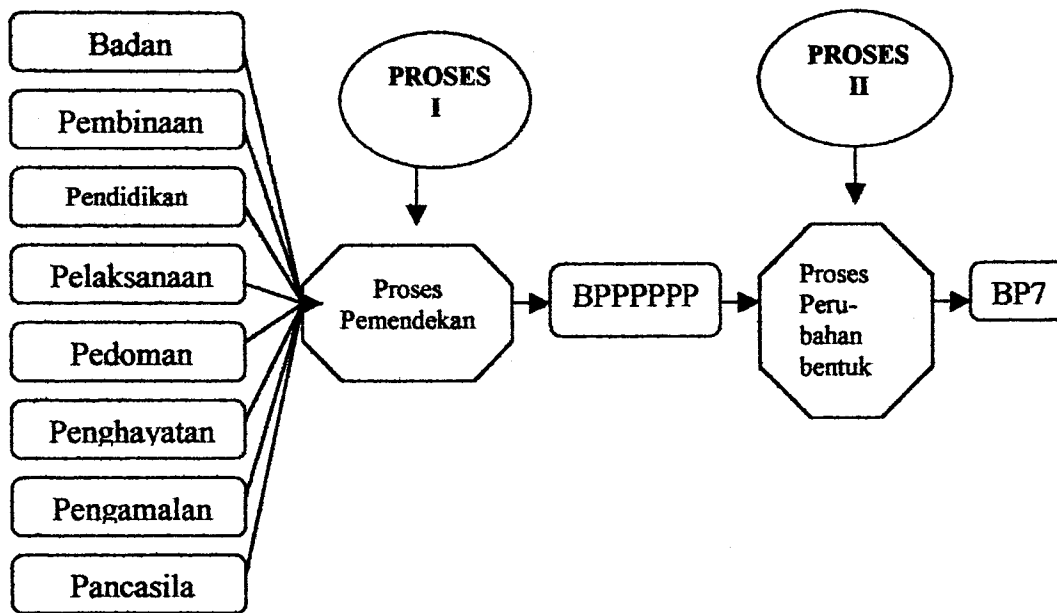
Pembentukan satuan lingual kependekan *RUU*, *KTT* memiliki perilaku kebahasaan yang berbeda dengan pembentukan satuan lingual kependekan *BP7*, *P4*. Perbedaan perilaku kebahasaan itu dapat dilihat berdasarkan pola pembentukan satuan lingual kependekan yang terdapat dalam bahasa Indonesia seperti yang telah dibicarakan pada subbab 5.1 sebelumnya. Pola pembentukan keempat satuan lingual itu adalah: (1) *Rancangan Undang-Undang* > *RUU* (fonem-fonem/huruf-huruf awal); (2) *Konferensi Tingkat Tinggi* > *KTT* (Fonem-fonem/huruf-huruf awal); (3) *Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* > *BPPPPPPP* (Fonem-fonem/huruf-huruf awal) > *BP7* (perubahan bentuk); (4) *Pedoman Penghayatan*

*Pengamalan Pancasila > PPPP (Fonem-fonem/huruf-huruf awal) > P4*  
(perubahan bentuk)

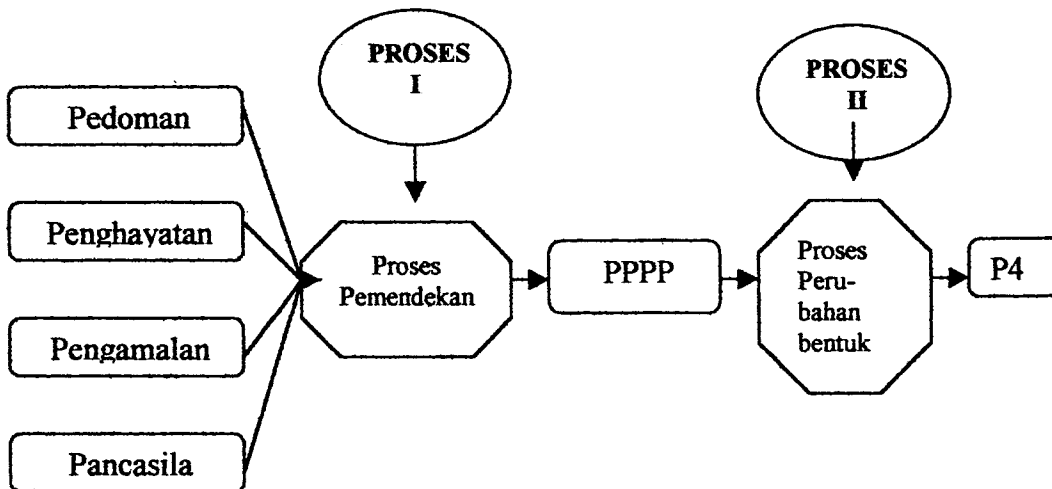
Berdasarkan analisis pola pembentukan *RUU, KTT, BP7* dan *P4* tersebut, keempat bentuk itu awalnya sama-sama mengalami proses pemendekan dengan pola yang sama yakni pengambilan fonem-fonem/huruf-huruf awal kata-kata yang dipendekkan. Bentuk satuan lingual kependekan *RUU* dan *KTT* memiliki dua fonem/huruf yang sama secara berturut-turut dan dapat diucapkan dengan mudah oleh penutur bahasa Indonesia. Hal itu berbeda dengan bentuk satuan lingual kependekan *BPPPPPPP*, dan *PPPP* yang memiliki tujuh fonem/huruf dan empat fonem/huruf secara berturut-turut dalam bentuk satuan lingual kependekan tersebut. Bentuk satuan lingual kependekan yang terdiri dari banyak fonem/huruf secara berturut-turut akan sulit diucapkan oleh para penutur. Karena itulah bentuk satuan lingual kependekan *BPPPPPPP* dan *PPPP* mengalami perubahan bentuk hingga mudah diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia dengan cara menggabungkan fonem/huruf dan angka yang mengacu pada jumlah fonem/huruf itu. Jadi, bentuk satuan lingual kependekan *BPPPPPPP > BP7* dan *PPPP > P4*.

Dengan demikian bentuk-bentuk satuan lingual kependekan fonem/huruf - angka seperti *BP7* dan *P4* mengalami dua kali proses pembentukannya. Kedua proses itu adalah (1) proses pemendekan, dan (2) proses perubahan bentuk. Proses kedua dilakukan karena bentuk satuan lingual kependekan yang dihasilkan proses (1) dengan fonem/huruf yang sama berturut-turut sulit diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Proses pembentukan satuan lingual kependekan berupa fonem/huruf-angka tersebut dapat digambarkan dengan bagan (3) di bawah ini.

*Bagan 3. Proses Pembentukan Satuan Lingual Kependekan Fonem-Angka*  
*Bagan 3.a*



*Bagan 3.b*



Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk satuan lingual kependekan yang terdiri atas fonem/huruf angka seperti *BP7* dan *P4* berasal dari satuan lingual kata yang berupa dua kata atau lebih (kelompok kata). Pembentukan satuan lingual kependekan berupa fonem/huruf -angka mengalami dua kali

proses seperti dijelaskan di atas yakni proses pemendekan dan proses perubahan bentuk. Proses pemendekan menghasilkan bentuk satuan lingual kependekan yang memiliki sejumlah fonem/huruf yang sama secara berturut-turut. Bentuk satuan lingual kependekan yang memiliki sejumlah fonem/huruf secara berturut-turut mengakibatkan terjadinya kesulitan pada pelafalannya. Oleh karena itu diperlukan proses perubahan bentuk satuan lingual kependekan yang mudah dan bisa dilafalkan oleh penutur bahasa Indonesia. Proses yang kedua tersebut yakni proses perubahan bentuk yang menghasilkan bentuk satuan lingual kependekan fonem/huruf dengan angka yang mengacu pada jumlah fonem/huruf tersebut.

Bentuk satuan lingual kependekan yang berupa penggabungan fonem/huruf -angka tersebut pada umumnya terjadi apabila proses pemendekan menghasilkan bentuk satuan lingual kependekan yang memiliki tiga fonem/huruf atau lebih secara berturut-urur. Bentuk satuan lingual kependekan tersebut misalnya *BP7* < Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, *P4* < Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, *BP3* < Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan, *P3* < Partai Persatuan Pembangunan. Apabila bentuk satuan lingual kependekan tersebut hanya memiliki dua fonem/huruf secara berturut-turut, maka penggabungan fonem/huruf -angka tidak perlu dilakukan. Bentuk satuan lingual kependekan tersebut tetap menggunakan dua fonem/huruf yang berturut-turut itu. Bentuk satuan lingual kependekan tersebut, misalnya *RUU* < Rancangan Undang-Undang, *UU* < Undang-Undang dan *KTT* < Konferensi Tingkat Tinggi.

#### 4.2.8 Pelafalan Bentuk Satuan Lingual Kependekan yang Meragukan Berdasarkan Bentuk Ortografisnya

Pelafalan bentuk satuan lingual kependekan berdasarkan bentuk ortografisnya masih ditemukan fenomena. Fenomena pelafalan itu adalah dimungkinkan adanya dua bentuk pelafalan tetapi umumnya hanya digunakan satu bentuk pelafalan saja. Pemilihan bentuk pelafalan itu tidak konsisten untuk setiap bentuk satuan lingual kependekan tersebut. Hal ini disebabkan aturan penulisan bentuk satuan lingual kependekan itu belum menunjukkan bentuk pelafalannya dengan aturan yang jelas.

Pembicaraan fenomena tersebut dapat dijelaskan berdasarkan contoh data nomor (38) – (41) berikut ini.

- (38) Sedangkan Operasi Pasar Murni yang dilakukan Dolog seharusnya dikurangi karena hanya sebagai ajang jual beli  $\left. \begin{array}{l} [de-o]. \\ [*do] \\ <DO> \\ \text{delivery order} \end{array} \right\}$   
 (Berita Nusantara II RRI Yogyakarta, pukul 20.30 WIB, 26-9-1998)

- (39) Peran  $\left. \begin{array}{l} \text{Koperasi Unit Desa} \\ [*kud] \\ [ka-u-de] \\ KUD \end{array} \right\}$  perlu ditingkatkan dan dikembangkan kembali secara baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan.

- (40) Mantan Kepala  $\left. \begin{array}{l} \text{Badan Intelijen Abri} \\ [*be-i-a] \\ [bia] \\ BIA \end{array} \right\}$  Mayjen Purn. Syazen Siregar mengadakan Direktur American Expres Bank cabang Singapura ke Polda Metro Jaya.

- (41) Menurut Ketua Umum  $\left. \begin{array}{l} \text{Partai Amanat Nasional} \\ \text{<PAN>} \\ \text{[*pe-a-en]} \\ \text{[pan]} \end{array} \right\}$  Doktor Amin Rais,  
 partainya akan muncul dengan percaya diri....  
 (Liputan 6 petang SCTV, 13 September 1998 /ragam lisan)

Pada contoh data nomor (38) – (41) di atas terdapat beberapa bentuk satuan lingual kependekan yang secara ortografis adalah *DO* < *Delivery Order*, *KUD* < *Koperasi Unit Desa*, *BIA* < *Badan Intelijen Abri*, *PAN* < *Partai Amanat Nasional*. Keempat bentuk satuan lingual kependekan tersebut sesuai dengan struktur silabel kata dalam bahasa Indonesia. Karena itu bentuk satuan lingual kependekan *DO*, *KUD*, *BIA*, *PAN* pada dasarnya dapat dilafalkan dengan [do], [kud], [bia], [pan] seperti pelafalan jenis akronim. Sebaliknya, bentuk satuan lingual kependekan *DO*, *KUD*, *BIA*, *PAN* dapat pula dilafalkan dengan pengejaan huruf-huruf (ortografis) sebagai silabel seperti pelafalan jenis singkatan yakni [de-o], [ka-u-de], [be-i-a], [pe-a-en]. Namun kenyataannya, pelafalan bentuk satuan lingual kependekan *DO*, *KUD*, *BIA*, *PAN* yang digunakan, mengacu pada salah satu bentuk pelafalan saja yang dapat dibagi atas dua kelompok. Bentuk satuan lingual kependekan *DO*, *KUD* dilafalkan dengan [de-o], [ka-u-de] sebagai jenis singkatan, dan bentuk satuan lingual kependekan *BIA*, *PAN* dilafalkan dengan [bia], [pan] sebagai jenis akronim.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata bentuk satuan lingual kependekan *DO*, *KUD*, *BIA*, *PAN* yang secara ortografis memiliki kesamaan bentuk penulisannya, memiliki bentuk pelafalan yang berbeda. Perbedaan pelafalan tersebut belum

ditunjukkan oleh bentuk ortografisnya atau perbedaan pelafalan tersebut belum ditunjukkan dalam bentuk ortografisnya.

Fenomena pelafalan bentuk satuan lingual kependekan tersebut menunjukkan bahwa Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan belum menampung cara penulisan bentuk satuan lingual kependekan yang bisa dijadikan pedoman untuk pelafalannya. Untuk pedoman pelafalan bentuk satuan lingual kependekan yang digolongkan ke dalam jenis singkatan perlu digunakan tanda titik (.) di akhir setiap huruf bentuk ortografisnya. Penggunaan tanda titik (.) bermanfaat untuk membedakan bentuk satuan lingual kependekan sebagai jenis penggalan, singkatan, akronim, dan semi akronim. Penggunaan tanda titik (.) itu telah digunakan pada beberapa bentuk satuan lingual kependekan jenis singkatan, semiakronim seperti <S.E.>, <M.B.A.>, <S.Kar>, <a.n.>, <d.a.>, <u.b.>, <u.p.> (Lihat Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan terbitan tahun 1993: 19-20). Pada bentuk satuan lingual kependekan di atas, huruf-huruf yang diikuti dengan tanda titik (.) pelafalannya harus dieja sebagai silabel. Karena itu bentuk satuan lingual kependekan di atas harus dilafalkan dengan [es-e], [em-be-a], [es-kar], [a-en], [de-a], [u-be], [u-pe] dan bukan dilafalkan dengan [\*se], [\*em-ba], [\*skar], [\*an], [\*da], [\*ub], [\*up].

Karena itu, penggunaan tanda titik (.) perlu ditetapkan dalam Pedoman Umum EYD Bahasa Indonesia untuk penulisan bentuk satuan lingual kependekan berupa singkatan dan semiakronim sebagai acuan pelafalan yang benar. Jadi, penulisan bentuk satuan lingual kependekan *DO*, *KUD* (pada contoh data nomor 38-39) di atas seharusnya digunakan tanda titik (.), maka bentuk ortografisnya

akan menjadi *D.O.* dan *K.U.D.* yang berarti dilafalkan dengan *[de-o]*, *[ka-u-de]* bukan dilafalkan dengan *[\*do]*, *[\*kud]*. Sedangkan penulisan bentuk satuan lingual kependekan *BIA*, *PAN* (pada contoh data nomor 40-41) di atas tetap tanpa tanda titik (.), dan harus dilafalkan dengan *[bia]*, *[pan]* bukan dilafalkan dengan *[\*be-i-a]*, *[\*pe-a-en]*.

Untuk lebih jelasnya pembicaraan tentang penulisan bentuk satuan lingual kependekan yang dapat memunculkan dua bentuk pelafalan, akan dikemukakan dengan beberapa contoh pada tabel nomor (1) di bawah ini.

*Tabel 1. Bentuk satuan lingual kependekan dengan dua kemungkinan bentuk pelafalannya*

| No | Bentuk Satuan Lingual Kependekan secara Ortografis | Dua Bentuk Pelafalannya                   | Bentuk Pelafalan yang Umumnya Digunakan dalam Bahasa Indonesia |
|----|--|---|--|
| 1  | DO   | <i>[de-o]</i> dan <i>[do]</i>             | <i>[de-o]</i>  |
| 2  | KUD  | <i>[ka-u-de]</i> dan <i>[kud]</i>         | <i>[ka-u-de]</i>   |
| 3  | BIA  | <i>[be-i-a]</i> dan <i>[bia]</i>          | <i>[bia]</i>   |
| 4  | PAN  | <i>[pe-a-en]</i> dan <i>[pan]</i>         | <i>[pan]</i>   |
| 5  | RUU  | <i>[er-u-u]</i> dan <i>[ru-u]</i>         | <i>[er-u-u]</i>  |
| 6  | BNI  | <i>[be-en-i]</i> dan <i>[be-ni]</i>       | <i>[be-en-i]</i>   |
| 7  | DPA  | <i>[de-pe-a]</i> dan <i>[de-pa]</i>       | <i>[de-pe-a]</i>   |
| 8  | PDI  | <i>[pe-de-i]</i> dan <i>[pe-di]</i>       | <i>[pe-de-i]</i>   |
| 9  | BLBI   | <i>[be-el-be-i]</i> dan <i>[be-el-bi]</i> | <i>[be-el-be-i]</i>  |
| 10 | PDAM   | <i>[pe-de-a-em]</i> dan <i>[pe-dam]</i>   | <i>[pe-de-a-em]</i> dan <i>[pe-dam]</i>                        |
| 11 | FABRI  | <i>[ef-abri]</i> dan <i>[fabri]</i>       | <i>[ef-abri]</i>   |
| 12 | FKIP   | <i>[ef-ka-i-pe]</i> dan <i>[ef-kip]</i>   | <i>[ef-ka-i-pe]</i> dan <i>[ef-kip]</i>                        |

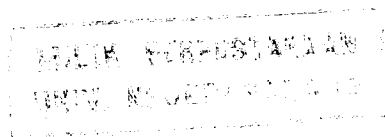
Jika bentuk-bentuk satuan lingual kependekan dalam tabel di atas ditetapkan bentuk pelafalan yang umumnya digunakan, maka bentuk ortografis satuan lingual kependekan dengan menggunakan tanda titik (.) adalah seperti dalam tabel nomor (2) di bawah ini.



*Tabel 2. Pelafalan bentuk satuan lingual kependekan yang seharusnya dalam bentuk ortografisnya*

| No. | Bentuk pelafalan yang umumnya digunakan dalam bahasa Indonesia | Bentuk satuan lingual kependekan yang seharusnya secara ortografis |
|-----|--|--|
| 1   | [de-o]   | D.O.   |
| 2   | [ka-u-de]  | K.U.D.   |
| 3   | [bia]  | BIA  |
| 4   | [pan]  | PAN  |
| 5   | [er-u-u]   | R.U.U.   |
| 6   | [be-en-i]  | B.N.I.   |
| 7   | [de-pe-a]  | D.P.A.   |
| 8   | [pe-de-i]  | P.D.I.   |
| 9   | [be-el-be-i]   | B.L.B.I.   |
| 10  | [pe-de-a-em]   | P.D.A.M.   |
| 11  | [pe-dam]   | P.DAM  |
| 12  | [ef-abri]  | F.ABRI   |
| 13  | [ef-ka-i-pe]   | F.K.I.P.   |
| 14  | [ef-kip]   | F.KIP  |

Jadi penggunaan tanda titik perlu digunakan pada bentuk ortografis satuan lingual kependekan jenis singkatan dan semiakronim untuk membedakannya dengan jenis akronim dan penggalan. Selain itu, manfaat penggunaan tanda titik pada bentuk ortografis satuan lingual kependekan jenis singkatan dan semi akronim adalah sebagai pedoman atau acuan pelafalan yang benar, karena setiap huruf yang diikuti tanda titik (.) pada setiap bentuk satuan lingual kependekan harus dilafalkan dengan mengeja hurufnya sebagai silabel.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa simpulan.

Pertama, fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan terdapat pada tataran fonologi. Misalnya, ada bentuk kependekan yang bertolak dari ragam tulis yakni dibentuk berdasarkan grafem bukan fonem seperti *Unpad* < *Universitas Padjajaran*, *Gg* < *Gang*. Bentuk kependekan yang tidak sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia misalnya *SIUPP*, *UNAND* maka dalam pelafalan terjadi penghilangan fonem. Bentuk kependekan seperti *Mendagri*, *Depdagri* terjadi penghilangan fonem /ə/ dari bentuk asal. Hal ini adalah penjatian penghilangan fonem /ə/ yang sering hilang dalam pelafalan.

Kedua, fenomena kebahasaan bentuk-bentuk kependekan terdapat pada tataran kata (morfologi). Bentuk kependekan yang seperti berasal dari kependekan padahal statusnya tetap sebagai kata seperti *AMD* < *Abri Masuk Desa*, *Pangab* < *Panglima Abri*. Bentuk kependekan yang homonim dapat diketahui maknanya berdasarkan konteks pemakaiannya. Bentuk ini misalnya *DO* < *Drop Out*, *DO* < *Delivery Order*, *PBB* < *Pajak Bumi dan Bangunan*, *PBB* < *Partai Bulan Bintang*, *PBB* < *Perserikatan Bangsa Bangsa*. Bentuk kependekan yang bergeser menjadi sebuah nama sehingga penggunaannya diikuti salah satu bentuk asalnya dalam komunikasi, misalnya *PSP Padang*, *Bank BNI*. Dalam pemendekan ada yang tidak

berita, pembaca teks dalam bahasa Indonesia. Karena itu aturan ini perlu dimasukkan dalam EYD bahasa Indonesia.

## KEPUSTAKAAN

- Anttila, Raimo. 1989. *Historical And Comparative Linguistic*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Bauer, Laurie. 1988. *Introducing Linguistic Morfologi*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- \_\_\_\_\_. 1983. *English Word Formation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chaer, Abdul. 1994a. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1994b. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyono, Budi Bambang. 1995. *Kristal-kristal Ilmu Bahasa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Crowley, Terry. 1987. *An Introduction of Historical Linguistic*. Papua New Guinea: University of Papua New Guinea Press.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 1979. *Acronymic Patterns in Indonesian*. Fasific Linguistic Series C, No.45. Canberra: The Australian National University.
- Moeliono. 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fromkin, dkk. (1988). *An Introduction to Language*. Sydney London Tokyo Toronto: Holf Rinekart and Winston.
- Keraf, Gorys. 1987. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Kurniawati, Arief. 1993. *Akronim dan Singkatan dalam Surat Kabar Harian (Skripsi)*. Yogyakarta : Fakultas Sastra UGM.
- Lyons, John. 1977. *Semantic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Matthews. 1974. *Morphology: An Introduction to The Theory of Word-Structure*. Cambridge: Cambridge University Press
- Notosusanto, Nugroho. 1979. *Masalah Akronim dan Singkatan dalam Bahasa Indonesia*. (dalam Majalah Bahasa dan Sastra tahun V. No.2. 1979).

- Parera, Jos Daniel. 1994. *Morfologi Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Pateda, Mansoer. 1995. *Kosakata dan Pengajarannya*. Ende Flores: Nusa Indah.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachmawati, Ani. 1988. *Akronim di dalam Bahasa Indonesia*. Makalah Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia X Se-Jawa Tengah dan DIY, 11-12 Oktober 1988 di IKIP Veteran-Sukoharjo.
- Ramlan. 1987. *Morfologi: Suatu Tinjauan Deskriptif*. Yogyakarta: CY Karyono.
- Soedjito. 1992. *Kosa Kata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Samsuri. 1994. *Analisis Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Sudaryanto. 1985. *Linguistik: Esai tentang Bahasa dan Pengantar ke dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Madah University Press.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Aneka Konsep Kadataan Lingual dalam Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana Press.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Metode Linguistik: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Madah University Press.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Subroto. D. Edi. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tarigan, H.G. 1986a. *Pengajaran Kosakata*. Bandung: Angkasa Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1986b. *Pengajaran Semantik*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Widodo, Bambang. 1984. *Singkatan dan Akronim dalam Bahasa Indonesia (Skripsi)*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- Winarno, Ateng. 1991. *Kamus Singkatan dan Akronim Baru dan Lama*. Yogyakarta: Kanisius.